

**PERAN KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA DI KAWASAN
INDO-PASIFIK : STUDI KASUS PEMERINTAHAN
JOKO WIDODO 2014-2023**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

INOVE ADETYANINGRUM

20323128

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**PERAN KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA DI KAWASAN
INDO PASIFIK : STUDI KASUS PEMERINTAHAN
JOKO WIDODO 2014-2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

INOVE ADETYANINGRUM

20323128

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA DI KAWASAN
INDO PASIFIK : STUDI KASUS PEMERINTAHAN
JOKO WIDODO 2014-2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan
Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Utami Dewi
Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

Hangga Fathana
Enggar Furi Herdianto
Hasbi Aswar

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 18 Maret 2024,



Inove Adetyaningrum

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara	17
1.8 Metode Penelitian	18
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>18</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>19</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>19</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>19</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	20
BAB 2	21
DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN AUSTRALIA	
.....	21
2.1 Konteks Histori Hubungan Indonesia-Australia	21
2.2 Kerja sama Indonesia-Australia di bidang Hukum, Hak Asasi	
Manusia, dan Keamanan.....	25
2.3 Kasus Buronan Korupsi Indonesia di Australia	33
BAB 3 PERAN INDONESIA DI KAWASAN INDO-PASIFIK.....	40
3.1 Peran Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia di kawasan Indo-	
Pasifik melalui Ego Role Conceptions.....	40
<i>3.1.1 Interest and Goal.....</i>	<i>43</i>
<i>3.1.2 Attitudes and Values</i>	<i>46</i>
<i>3.1.3 Personality Needs</i>	<i>48</i>

3.2 Peran Indonesia Menjadi Negara Berkekuatan Menengah yang Menjaga Stabilitas Keamanan Kawasan Indo-Pasifik	51
3.2.1 Culture	53
3.2.2 Organizations	56
BAB 4	59
4.1 Kesimpulan	59
2.2 Rekomendasi	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Role Theory and the Sources of Human Behavior	12
Gambar 1. 2. Implementasi Role Theory and the Sources of Human Behavior dalam Peran Politik Luar Negeri Era Joko Widodo dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.....	43

ABSTRAK

Indonesia-Australia merupakan salah satu negara berkekuatan menengah yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Keduanya telah melakukan kerja sama sejak tahun 1945 baik dalam kerja sama bilateral maupun multilateral. Melihat belakngan Indonesia-Australia fokus berorientasi terhadap stabilitas ekonomi kedua negara, Pada Pemerintahan Joko Widodo di tahun 2014-2023 Indonesia-Australia mengembangkan peran kerja sama untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Skripsi ini menggunakan teori peran kerja sama K.J Holsti yang menjelaskan tindakan pengambilan kebijakan terhadap keputusan, aturan, dan fungsi sebuah negara dalam mengatasi masalah internasional. Melalui tahapan *Ego Role Conceptions* dan *Alter's Prescriptions*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam mewujudkan stabilitas dalam kawasan Indo-Pasifik perlu adanya kerja sama internasional dalam penegakan HAM, menjaga keamanan maritim, dan mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia merupakan cara memperkuat hubungan antar negara yang dapat mewujudkan perdamaian yang tidak hanya untuk kedua negara namun juga menjadi salah satu wujud upaya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Kata-kata kunci: Peran Indonesia, Kerja sama, Stabilitas Indo-Pasifik

ABSTRACT

Indonesia-Australia is a middle-power country in the Indo-Pacific region. The two have collaborated since 1945 in both bilateral and multilateral cooperation. Seeing recently, Indonesia-Australia's focus was oriented towards the economic stability of the two countries. During the Joko Widodo administration in 2014-2023, Indonesia-Australia developed a common working role to maintain the stability of the Indo-Pacific region. This thesis uses K.J Holsti's cooperative role theory which explains policy-making actions regarding decisions, rules and functions of a country in overcoming international problems. Through the stages of Ego Role Conception and Alter's Prescription. The results of this research explain that in realizing stability in the Indo-Pacific region, there needs to be international cooperation in upholding human rights, maintaining maritime security, and making Indonesia a world maritime axis, which is a way to strengthen relations between countries that can create peace not only for the two countries but It is also a form of effort to maintain peace and stability in the Indo-Pacific region.

Keywords: *Indonesia's Role, Cooperation, Indo-Pacific Stability*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional bagi suatu negara sangat penting, termasuk Indonesia. Dengan ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam hubungan internasional sehingga akan memperoleh manfaat salah satunya, mendapat dukungan dari negara lain demi menjaga keberlangsungan hidup, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Politik luar negeri adalah salah satu cara yang dilakukan oleh suatu negara demi kepentingan nasional dan mendapatkan tujuan negara. Terciptanya hubungan internasional disebabkan oleh dorongan beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti adanya rasa khawatir terancamnya keberlangsungan hidup ke depan, baik disebabkan oleh kudeta maupun intervensi dari negara lain. Adapun beberapa faktor eksternalnya seperti ketergantungan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan serta kerja sama dari negara lain. Ketergantungan dalam konteks yang dibahas yakni dalam upaya membantu meningkatkan ekonomi negara, membuat perjanjian internasional, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan suatu negara (Wibawana 2023).

Pentingnya menjalin kerja sama internasional agar menghindari dari berbagai ancaman baik ancaman dari lingkup regional maupun internasional. Hal ini telah ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI). Ancaman nyata yang sifatnya tidak terduga seperti, terorisme, wabah penyakit, bencana alam, perang, separatis, kejahatan maritim, kejahatan siber serta penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkoba yang berdampak

multikompleks untuk ditangani bersama. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman nyata tersebut perlu melakukan kolaboratif melalui kerja sama internasional, kerja sama dengan negara lain merupakan suatu keharusan dan sudah menjadi tuntutan. Sebab akan menciptakan perdamaian dan stabilitas negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2015).

Saat ini, Indonesia tercatat telah menjalin kerja sama bilateral dengan 162 negara dan salah satu negara tersebut adalah Australia (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kazakhstan 2018). Indonesia berada di wilayah dua benua, yakni Benua Asia dan Australia dan dengan dua Samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Serta Indonesia berada pada Selat Malaka, Selat Lombok dan Selat Sunda yang merupakan jalur utama lintas perdagangan Asia. Letak Indonesia yang menguntungkan secara geoekonomi dan geostrategis menjadikan Indonesia memiliki peran yang cukup strategis di mata internasional termasuk bagi Australia (Sobarini 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir istilah Indo-Pasifik semakin banyak digunakan dalam diskusi strategis yakni seperti beredar di Indonesia, Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan India. Indo-Pasifik melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai satu linear zona maritim yang terciptanya kebijakan luar negeri dan pertahanan (Scott 2019). Pemaknaan dari wilayah Indo-Pasifik muncul bukan mengacu pada wilayah regional yang terbentuk oleh integritas kawasan regional, seperti halnya Asia Tenggara atau Asia dan Eropa (Medcalf 2014). Indo-Pasifik merupakan perkembangan isu baru di politik internasional, Dengan mengacu pada konstruksi tatanan keamanan yang mengedepankan kepentingan maritim (Kitaoka 2019). Indo-Pasifik memainkan hampir seluruhnya sebagai

konstruksi maritim daripada kontinental (Yanuarti, Wibisono, dan Midhio 2020). Oleh sebab itu, negara yang ikut terlibat semakin bertambah dengan konstruksi Indo-Pasifik. Setiap negara harus menghadapi mengatasi masalah koordinasi serta pembagian beban apabila konsep kebijakan luar negerinya ingin memiliki posisi strategis.

Posisi Indonesia yang berada di persimpangan dua samudera (Hindia dan Pasifik), dimana sebagian dari wilayah perairannya yang luas menjadi jalur perlintasan maritim dunia, membuat Indonesia tidak dapat mengabaikan permasalahan keamanan maritim perairan yurisdiksinya (Limbong 2015). Indonesia juga memberikan perhatian terhadap permasalahan keamanan maritim kawasan Indo-Pasifik, Hal ini apabila permasalahan keamanan maritim tersebut tidak tertangani dengan baik maka akan berdampak juga terhadap Indonesia. Salah satu jalan bagi Indonesia untuk mencapai Poros Maritim Dunia adalah dengan menjalin kerja sama dengan negara lain dalam bidang maritim. Australia, negara yang berbagi lautan langsung dengan Indonesia serta berada dalam satu kawasan yang sama menjadi pasangan yang pas bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama maritim. Negara Indonesia dan Australia berbagi kepentingan bersama dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional serta menangani sengketa teritorial di wilayah tersebut, yaitu kondisi prasyarat yang harus Indonesia capai untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Meski hubungan Indonesia-Australia sering bertentangan namun melihat kedua negara berada di posisi saling tergantung satu sama lain, terutama dalam kerja sama maritim (Ramadhany 2020).

Pentingnya kerja sama antara Indonesia-Australia adalah karena letak geografis antara Indonesia-Australia yang berdekatan dan ini adalah salah satu

keuntungan yang tidak dapat diingkari. Kedekatan Geografis yang dimiliki Indonesia-Australia menjadi sangat penting secara geopolitik bagi kedua negara untuk dapat menjalin hubungan bilateral dan kontribusi menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Posisi Indonesia-Australia sama-sama rentan terhadap berbagai ancaman nyata seperti terorisme, keamanan maritim, radikalisme dan lainnya yang setiap saat akan dapat mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik (Humas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2009).

Alasan Australia memilih Indonesia sebagai salah satu mitra kerja samanya telah disebutkan dalam *foreign policy paper* di tahun 2017. Posisi Indonesia yang strategis berada di antara samudera Hindia dan Samudera Pasifik dapat membuat Indonesia sebagai pemimpin di kawasan, termasuk ASEAN (Australian Government 2017). Australia menganggap Indonesia adalah negara yang penting karena dinilai mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi tatanan kawasan Indo-Pasifik. Dalam hal ini Australia tidak dapat mengabaikan posisi Indonesia apabila Australia ingin tampil menjadi bagian salah satu kekuatan berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia-Australia memiliki posisi yang sama yakni saling membutuhkan untuk dapat memenuhi kepentingan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Keinginan Indonesia-Australia dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, bebas, berlandaskan aturan internasional dan inklusif merupakan akar utama yang penting dimiliki kedua negara dalam mengatasi sebuah permasalahan. Kerja sama pertahanan dengan Indonesia menjadi prioritas penting bagi Australia adalah terkait peningkatan kerja sama di bidang keamanan maritim dan penanggulangan bencana alam juga menjadi prioritas utama bagi kerja sama pertahanan antara kedua negara kedepannya (Humas Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia 2009). Penguatan kerja sama Indonesia-Australia dan kemitraan bilateral mempunyai arti penting untuk menjalin kerja sama yang lebih luas lagi antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik (Roza 2021).

Hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia-Australia telah dimulai sejak tahun 1949. Bagi Indonesia, Australia merupakan peluang kerja sama yang besar untuk membantu peningkatan ekonomi. Begitu juga dengan Australia melihat Indonesia sebagai mitra kerja sama ekonomi yang potensial di bidang perdagangan, bisnis dan investasi. Mengutip data dari Kementerian Luar Negeri volume perdagangan bilateral Indonesia-Australia meningkat 8,347% yakni dari tahun 2020 sebesar US\$ 7,1 miliar menjadi US\$12,6 miliar di tahun 2021. Surplus perdagangan berada di pihak Australia sebesar US\$ 6,2 miliar (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2023).

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia memutuskan untuk lebih memfokuskan kinerja praktik diplomasinya pada diplomasi ekonomi. Agar sejalan dengan ketergantungan pemenuhan kebutuhan secara utuh beserta geopolitik dan geoekonomi yang ada. Komitmen Indonesia dalam memfokuskan praktik diplomasi ekonomi juga terdapat pada salah satu dari 8 sasaran strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2015-2019. Hal ini membuktikan Indonesia ingin menunjukkan keunggulannya dibandingkan dari negara-negara lain dalam praktik diplomasi ekonomi (Wulandari dan Suryadipura 2021). Dalam upaya mencapai tujuan Indonesia untuk meningkatkan diplomasi pada bidang ekonomi, Indonesia memilih Australia dari salah satu negara di *cluster* pasar tradisionalnya sebagai penguat hubungan diplomasi ekonomi.

Pada tahun 2015, Perdana Menteri Malcolm Turnbull menemui Presiden Joko Widodo di Indonesia untuk membahas keberlanjutan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Pada tahun 2016, perundingan IA-CEPA kembali dibuka oleh menteri perdagangan kedua negara setelah sempat terhenti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Sesuai dengan fokus praktik diplomasi era Joko Widodo di bidang ekonomi Jokowi menyetujui ajakan kerja sama pemerintah Australia terkait IA-CEPA. Dalam rentang waktu 2 periode masa kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia-Australia berhasil melakukan 10 putaran perundingan (Wulandari dan Suryadipura 2021).

Australia telah meratifikasi IA-CEPA pada bulan November 2019, tidak lama kemudian pada bulan Februari 2020 Indonesia juga meratifikasi IA-CEPA. Ratifikasi ini berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur perihal penyerapan tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya, agar mampu bersaing di ranah global (Wulandari dan Suryadipura 2021). IA-CEPA telah berlaku dengan beberapa *highlights* seperti penghapusan dan penurunan tarif, memanfaatkan keunggulan produk kedua negara, dan saling meningkatkan investasi (Wulandari dan Suryadipura 2021). Pengimplementasian IA-CEPA di bidang investasi dan perdagangan telah berhasil meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke Australia dengan dihapuskannya tarif hingga 0 persen yang menjadi hambatan. Keberhasilan IA-CEPA juga dapat dilihat dari pemulihan ekonomi Indonesia dalam terwujudnya program Katalis yang berada pada pengawasan IA-CEPA. Adapula keberhasilan dalam sektor barang dan jasa Indonesia memanfaatkan akses pertambangan dan sumber daya mineral Australia dalam mengembangkan industri manufaktur kendaraan listrik (*electric vehicles*) untuk

kebutuhan dalam memproduksi EV. Selain itu, IA-CEPA juga telah berhasil pada sektor pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan kerja di tempat kerja, pertukaran keterampilan timbal balik dan aturan visa bekerja dan liburan dalam pemenuhan peningkatan keterampilan dan juga pengetahuan tenaga kerja Indonesia (Nuranisa 2022). Langkah-langkah yang dijalankan pada kerja sama IA-CEPA telah berhasil membantu Indonesia dalam pemulihan ekonomi yang sempat menurun akibat pandemi COVID-19 melalui program kerja samanya di bidang ekonomi, investasi, pemberdayaan manusia serta barang dan jasa.

Indonesia-Australia sama-sama negara *middle power* negara berkekuatan menengah. Keduanya telah melakukan kerja sama sejak tahun 1945 baik dalam kerja sama bilateral maupun multilateral. Melihat belakangan Indonesia-Australia fokus tidak hanya berorientasi terhadap stabilitas ekonomi kedua negara saja. Baik itu Indonesia maupun Australia. Pada Pemerintahan Joko Widodo di tahun 2014-2023 Indonesia-Australia mengembangkan sejumlah kerja sama untuk menguatkan tujuan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kerja sama ini memunculkan sejumlah peran baik bagi Indonesia maupun Australia di dalam kawasan Indo-Pasifik. Hal ini kemudian memantik pertanyaan, lantas Bagaimana peran kerja sama yang dijalankan Indonesia-Australia di Kawasan Indo-Pasifik.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana peran kerja sama Indonesia-Australia di kawasan Indo-Pasifik studi kasus : Pemerintah Joko Widodo 2014-2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kerja sama pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kerja sama di bidang non-ekonomi dengan Australia pada tahun 2014-2023.
2. Untuk menganalisis peran kerja sama Indonesia-Australia dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik masa pemerintahan Joko Widodo 2014-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian dalam tulisan ini termasuk ke dalam lingkup Politik Kerja Sama Internasional. Pada dasarnya, setiap negara membutuhkan adanya kerja sama. Sama seperti makhluk sosial membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini pun berlaku kepada sebuah negara yang tidak bisa berdiri tanpa negara lain, sebagaimana negara yang ingin merdeka, tentu tidak dapat terlaksana jika tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain. Penelitian ini memfokuskan pada 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo yakni pada 2014-2023 dalam peran kerja sama Indonesia-Australia di Kawasan Indo-Pasifik studi kasus : Pemerintah Joko Widodo 2014-2023. Kajian pembahasan yang akan digunakan dalam tulisan ini juga berkaitan dengan strategi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah di era Joko Widodo dalam melaksanakan kerja sama hubungan luar negerinya dengan Australia. Demi menciptakan hubungan yang lebih luas serta meningkatkan stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.

1.5 Tinjauan Pustaka

Vinsensio M. A. Dugis menuliskan dalam penelitiannya perihal upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia-Australia dalam memperkuat hubungan bilateral yang sebelumnya pernah berada di titik rendah. Penelitian ini juga membahas sejarah awal hubungan Indonesia-Australia dari awal kemerdekaan Indonesia. Pentingnya memperbaiki hubungan sebelumnya agar dapat melanjutkan diplomasi antar kedua negara. Diplomasi merupakan alat yang dapat membantu memperbaiki hubungan antarnegara ketika kedua negara memiliki hubungan yang kurang baik. Karena dari diplomasi akan membangun kembali kepercayaan yang sebelumnya sempat memudar. Vinsensio juga menjelaskan pada penelitiannya bahwa diplomasi yang dilakukan Indonesia-Australia adalah Diplomasi Pertemanan sebagai bentuk mekanisme pendukung hubungan diplomasi resmi seperti kedekatan personal antar pejabat. Vinsensio juga menjelaskan bahwa pada era kepemimpinan Joko Widodo mampu membuka kembali hubungan personal antara Indonesia-Australia. Dengan gaya blusukan Jokowi mampu menerapkan *Blusukan Diplomacy* di dalam menata hubungan persahabatan kedua negara lebih luas lagi. Cara ini mampu membuka banyak kesempatan bagi kedua pihak agar dapat mencapai kepentingan-kepentingan yang sejalan. Hal ini tentu saja menjadi benih-benih unggul untuk membangun kerja sama Indonesia-Australia yang semakin lebih berarti ke depannya.

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan rujukan utama sebagai bahan bacaan, yakni pada penelitian Alvira Rizki Wulandari dan Dadan Suryadipura. Alvira dan Dadan menuliskan tentang bagaimana pentingnya diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia-Australia pada era pemerintahan

Joko Widodo tahun 2014-2019 yakni *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). IA-CEPA merupakan sebuah perjanjian pertama bagi Indonesia yang bukan hanya menjadi kepentingan personal namun lebih kepada kepentingan kelompok bisnis. Pada Pemerintahan Joko Widodo Diplomasi Ekonomi menjadi salah satu fokus perencanaan untuk dapat mendorong Indonesia meningkatkan ekonominya baik di pasar tradisional maupun non tradisional. Alvira dan Dadan juga menjelaskan mengenai beberapa studi terdahulu dalam praktik diplomasi ekonomi yang dilaksanakan oleh Indonesia dan studi terdahulu mengenai IA-CEPA. Selain itu, penulis juga menjelaskan adanya aspek penting dari diplomasi ekonomi Indonesia yakni pengikatan kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata atau *Trade, Tourism, Investment* (TTI).

Salma Alysa Nuranisa dan Arie Kusuma Paksi menjelaskan peran kerja sama *Indonesia-Australia Comprehensive Economic* (IA-CEPA) dan kontribusi dari IA-CEPA terhadap pemulihan ekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Salma dan Arie menjelaskan secara jelas program-program yang dilakukan IA-CEPA dalam fokus penguatan ekonomi Indonesia pada sektor investasi dan ekonomi, barang dan jasa serta fokus dengan pengembangan sumber daya manusia. Dalam tulisan tersebut juga membahas peran strategis Australia dalam kerja sama IA-CEPA dalam kurun waktu 2020-2022 yang mana rentan tersebut memang berfokus pada pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salma dan Arie menjelaskan bahwa kerja sama Indonesia-Australia di bidang ekonomi memiliki kontribusi yang cukup besar, IA-CEPA dapat membuka peluang pasar dan peluang baru bagi bisnis, investor, produsen utama dan penyedia layanan. Pada krisis ekonomi yang dialami Indonesia upaya yang dilakukan pemerintah

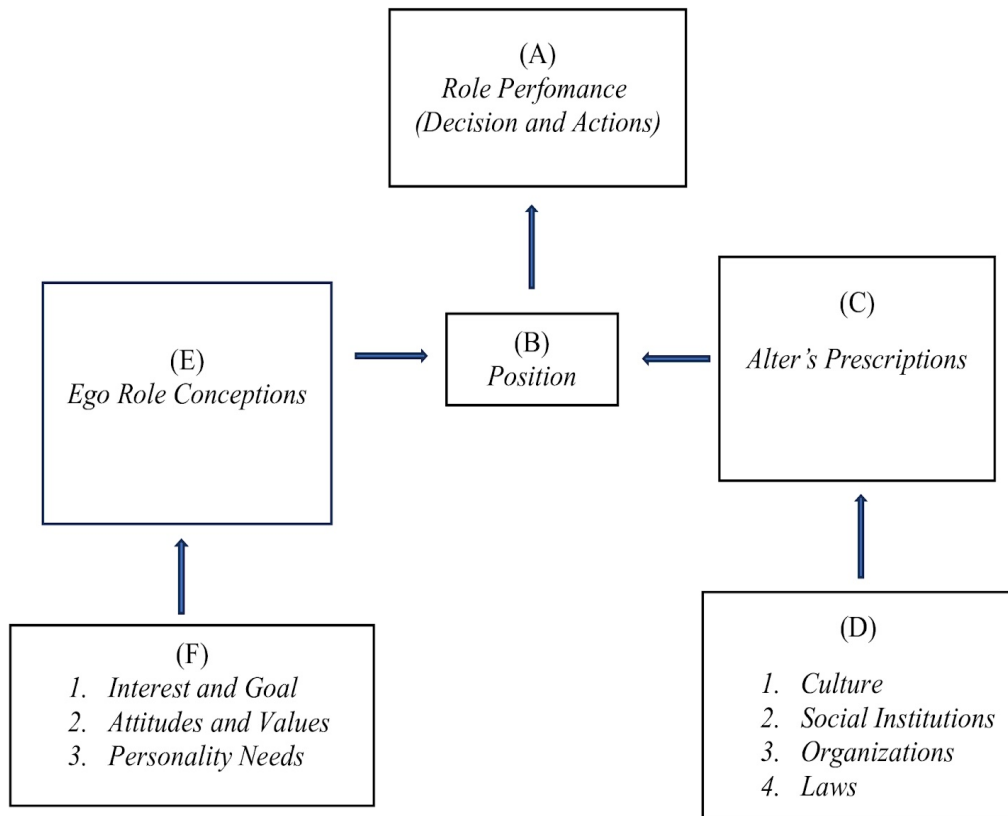
dapat membuat Indonesia meningkatkan daya saing dan akses pasar produk baik itu perindustrian, perikanan, kehutanan, perikanan bahkan sampai tenaga kerja RI. Salma dan Arie menjelaskan dengan rinci angka-angka dari pendapatan hasil program IA-CEPA. Dengan ini apabila kerja sama IA-CEPA terus dilakukan sebaik mungkin maka dapat membantu perekonomian Indonesia.

Adapun yang menjadi perbedaan yang signifikan pada penelitian yang ditulis oleh penulis terdapat pada perspektif dan model yang digunakan. Selain itu, dalam penelitian di atas fokus membahas pada kerja sama Indonesia-Australia di bidang ekonomi tanpa membahas kerja sama Indonesia-Australia di bidang non-ekonomi. Melihat kerja sama antar negara di bidang non-ekonomi juga memiliki dampak yang sangat penting dalam bentuk hubungan internasional, keamanan global, mempersiapkan tantangan global, dan mempromosikan perdamaian dunia. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan penulis akan mengkaji lebih dalam terkait peran dan kerja sama pemerintah Indonesia dalam Mengembangkan Hubungan Non-Ekonomi Dengan Australia Dalam Masa Periode Joko Widodo 2014-2023.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab rumusan masalah di atas diperlukan analisis berpikir dengan sebuah teori atau konsep. Penulis menggunakan teori peran K.J Holsti.

Gambar 1. 1. Role Theory and the Sources of Human Behavior



Sumber : KJ. Holsti 'National Role Conception in the Study of Foreign Policy' (1970)

Kerangka pemikiran merupakan dasar analisis yang kita gunakan dalam menjelaskan korelasi dan uraian dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel terbagi menjadi dua yakni variabel dependen dan independen. Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi dan terjadi akibat variabel bebas. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi berubahnya variabel dependen (Sugiyono,2012 : 39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, sedangkan variabel dependennya adalah upaya peran kerja sama pemerintah Indonesia dalam melindungi daerah kawasan Indo-Pasifik terkait ancaman yang terjadi dari luar negara. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan Teori Peranan yang dicetuskan oleh K.J Holsti. Dalam bukunya *International Politics an Analytical Framework* yang ditulis oleh K.J Holsti, teori peranan adalah: “Konsep peranan yaitu, tindakan pengambil kebijakan terhadap keputusan, aturan, dan fungsi negara untuk mengatasi masalah internasional. Selain itu, peranan juga merupakan sikap terhadap lingkungan, geografi, dan ekonomi” (K.J Holsti 1983).

Peranan nasional dilihat sebagai kebijakan luar negeri sebuah negara ketika mengalami masalah internasional. Maka, peranan nasional adalah posisi yang diambil atau dijalankan negara. Kebijakan luar negeri akan menggambarkan bagaimana orientasi suatu negara. Sehingga, dua hal ini akan menjelaskan alasan suatu negara membentuk hubungan kerja sama dengan negara lain. Peranan nasional dan tujuan suatu negara dalam mengambil tindakan, merupakan dua hal yang berkaitan. Sehingga, peranan nasional suatu negara dapat diidentifikasi dari tujuan negara tersebut.

Dalam hal ini, Indonesia memiliki peran dalam permasalahan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik karena posisi Indonesia yang berada di persimpangan dua samudera (Hindia dan Pasifik), dimana sebagian dari wilayah perairannya yang luas menjadi jalur perlintasan maritim dunia. Peran nasional Indonesia dalam permasalahan ini adalah dengan mengambil posisi yang dijalankan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti menjadi poros maritim dunia di kawasan Indo-Pasifik dan menjadi negara berkekuatan menengah yang menjaga stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik. Kedua upaya ini merupakan peranan nasional Indonesia yang mengidentifikasi tujuan Indonesia untuk melindungi stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Dalam teorinya KJ Holsti memiliki kategori analisis peran yang dimiliki oleh negara yaitu *Role Performance* adalah perilaku dan segala tindakan negara dalam politik internasional, dan *Position* adalah status peran negara dalam menentukan keberpihakan. Tabel di atas menjelaskan mengenai pola perilaku dengan memeriksa hubungan antar komponen. Di mana, posisi suatu negara dalam *Role Performance* (keputusan, tindakan, maupun sikap yang diambil oleh suatu pemerintah dalam permasalahan internasional) dapat dilihat melalui 2 role, yaitu:

- a. *Ego's Role Conceptions*: *Ego's Role Conceptions* yaitu suatu faktor lingkungan internal yang dapat memberikan pengaruh dalam perumusan *Ego's Role Conceptions* dari para pembuatan kebijakan dalam negeri suatu negara. *Ego's Role Conceptions* bersumber dari dalam negara seperti *Interest and goal, Personality Needs, Attitude and value* (Holsti 1970).
- b. *Alter's Prescriptions*: *Alter's role prescription* yaitu suatu faktor lingkungan eksternal yang dapat memberikan pengaruh dalam perumusan *Role Conception* dari para pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. *Alter's role prescription* bersumber dari luar negara seperti *Culture* dan *Organizations* yang terlibat dalam melakukan sebuah peran. (Holsti 1970).

Selain itu, hubungan antara konsep peran dan komponen, yaitu antara komponen *ego role conception, alter's prescription, dan position* menjelaskan komponen *role performance* yang berupa tindakan dan keputusan yang diambil oleh suatu pemerintah/negara dalam permasalahan internasional. Kemudian, komponen *role performance* juga memiliki keterkaitan dengan komponen *position, ego role*

conception, yakni *interest and goals*, *attitudes and values*, dan *personality needs*. Atau komponen *role performance* yang memiliki keterkaitan dengan komponen posisi, *alter's prescription*, yaitu, *Culture* dan *Organization*.

Landasan tingkah laku manusia, menurut teori peran K.J Holsti, adalah posisi dan norma dan harapan perubahan proyek pada posisi tersebut. Peran nasional para pengambil kebijakan serta keputusan dan tindakan kebijakan luar negeri mereka juga dipengaruhi atau didorong oleh lingkungan internal dalam suatu negara. K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan teori peran kerja samanya, yaitu:

- *Interest and Goal* meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan.
- *Attitudes and Values* merupakan prinsip dan nilai yang sudah ada dalam suatu negara menjadikan tujuan dari para pembuat keputusan.
- *Personality Needs* merupakan sebuah kepentingan nasional merupakan tujuan, pencapaian, ataupun preferensi kebijakan yang dibuktikan dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri dengan memiliki tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu negara.

K.J Holsti menyimpulkan bahwa konsepsi peran nasional para pengambil kebijakan serta keputusan dan tindakan kebijakan luar negeri mereka juga dipengaruhi atau didorong oleh dampak internasional dari perubahan sosial

tersebut, yaitu konsepsi peran nasional juga terkait dengan, atau didukung oleh, resep peran yang berasal dari lingkungan eksternal. Dapat dipengaruhi oleh harapan rekan sejawat kelompok, aturan *organizations*, *laws*, *social institutions*, adat istiadat sosial, nilai-nilai *culture* dan tradisi. Serta oleh konsepsi diri tentang peran. K.J. Holsti memberikan empat kriteria untuk mengklasifikasikan teori peran kerja samanya, yaitu:

- *Culture* : Culture merupakan konsepsi peran nasional para pengambil kebijakan serta keputusan dan tindakan kebijakan luar negeri mereka juga dipengaruhi atau didorong oleh dampak budaya, adat istiadat, tradisi yang dimiliki oleh suatu negara sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kerja sama internasional.
- *Organizations* : konsepsi dalam nasional ini berperan dalam mediator-integrator bertanggung jawab untuk memenuhi atau melakukan tugas-tugas khusus untuk mendamaikan konflik antara negara atau kelompok negara lain. *Organizations* peran nasional ini menunjukkan persepsi tentang tugas yang berkelanjutan untuk membantu musuh mengenali menghilangkan perbedaan mereka.

Dalam penelitian ini, posisi Indonesia sebagai pembuat kebijakan, mengambil tindakan dan keputusan untuk mengeluarkan 2 kebijakan, yaitu *Defence Cooperation Agreement* dan AIPJ dalam upaya kerja sama menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. *Role conceptions* Indonesia berasal dari tujuan Indonesia, yaitu untuk menjaga stabilitas dalam kawasan Indo-Pasifik, yaitu upaya dalam berupaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan bekerja sama

dengan negara kawasan namun, tetap berpegang nilai dan prinsip kebijakan politik luar negerinya yakni bebas aktif.

Memperbaiki kembali hubungan di masa lampau yang sempat mengalami pasang surut, tujuan dilakukannya kerja sama sebagai bentuk perdamaian dan stabilitas keamanan di regional maupun dunia, dapat memperkenalkan kepada dunia internasional hubungan erat serta bersahabat, dapat menetapkan suatu kerangka tujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral bagi kawasan, mengintegrasikan kesepakatan-kesepakatan yang telah terjadi dimasa lalu (bila sebelumnya sudah memiliki bentuk kesepakatan) serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kedua negara (Makmur Supriyatno, 2014, p. 150).

1.7 Argumen Sementara

Peran Pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik pada pemerintahan Joko Widodo 2014-2023 dilakukan dengan langkah awal yaitu melakukan memperbaiki hubungan sebelumnya agar dapat melanjutkan diplomasi antar kedua negara. Diplomasi merupakan alat yang dapat membantu memperbaiki hubungan antarnegara ketika kedua negara memiliki hubungan yang kurang baik. Terus berupaya untuk berbagi informasi terkait aspek keamanan, pertahanan, hukum, sosial dan informasi kasus korupsi dengan negara-negara mitra, termasuk Australia. Pertukaran informasi ini penting untuk mempercepat proses penanganan kasus dan ekstradisi buronan koruptor sebagai dinamika kerja sama Indonesia-Australia di bidang pertahanan dan keamanan. Kerja sama hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia berusaha memperkuat kerja sama hukum dengan negara-negara lain, termasuk Australia. Ini termasuk pertukaran pengalaman dalam

penyelidikan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman terhadap kasus-kasus korupsi. Perjanjian ekstradisi dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa negara, termasuk Australia. Perjanjian ini memungkinkan kedua negara untuk saling meng ekstradisi buronan yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk korupsi.

Sebelum menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, Indonesia-Australia terlebih dahulu melakukan kerja sama antar negara di bidang non-ekonomi. Sebab, ada beberapa aspek penting juga harus dilakukan oleh Indonesia untuk mensejahterakan negaranya seperti, kerja sama di bidang keamanan internasional, hukum internasional, pendidikan dan hak asasi manusia.

Adapun dirasa menjadi alasan mengapa dalam masa pemerintahan Joko Widodo memfokuskan ekonomi selain posisi Indonesia yang menguntungkan secara geoekonomi dan geostrategis menjadikan Indonesia memiliki peran yang cukup strategis di mata internasional, yakni Indonesia bahkan di seluruh dunia diterpa masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua aktivitas baik aktivitas ekonomi dan transnasional harus dibatasi. Hal ini membuat keadaan ekonomi di seluruh dunia terutama di Indonesia menjadi beku atau bahkan memburuk.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Studi literatur adalah proses penelitian dan analisis yang melibatkan kajian terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Metode kualitatif melalui studi literatur. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata, baik itu secara tertulis maupun lisan yang didapat melalui wawancara maupun tulisan seperti buku, jurnal artikel, website resmi dan berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini merupakan Pemerintah Indonesia. Hal itu dikarenakan dalam studi kasus yang penulis tentukan berkaitan langsung dengan negara tersebut. Sedangkan objek dari penelitian ini merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Australia..

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur yakni proses penelitian dan analisis yang melibatkan kajian terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Data yang didapat oleh penulis berasal dari sumber primer yang dilakukan dengan mengumpulkan jurnal, buku, data, tulisan di perpustakaan atau internet serta berita-berita yang dikeluarkan oleh badan-badan peneliti yang melakukan riset terhadap keperluan penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian pertama adalah dimulai dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian. Langkah berikutnya adalah peneliti menyeleksi data tersebut berdasarkan keterkaitannya dengan isu. Dan terakhir menyeleksi data dan menganalisis dengan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan penulis.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada **BAB I**, penulis akan memaparkan terkait latar belakang penelitian, meneliti rumusan masalah yang akan dibahas, menyebutkan tujuan penelitian, meninjau menggunakan beberapa pustaka, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada **BAB II**, berisikan Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia. Menjelaskan sejarah hubungan Indonesia-Australia dengan terkait permasalahan mengenai kaburnya buronan Korupsi Ke Australia dan disertakan dengan kerja sama Indonesia-Australia di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

Pada **BAB III**, berisikan mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kerja sama di kawasan Indo-Pasifik : studi kasus pemerintahan Joko Widodo 2014-2023 yang diselaraskan dengan teori peran K.J Holsti

Pada **BAB IV**, berisi tentang ringkasan atau kesimpulan dari pembahasan analisis yang tersaji pada Bab I hingga Bab IV sekaligus memberikan saran atau rekomendasi bagi peneliti kedepannya.

BAB 2

DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN AUSTRALIA

2.1 Konteks Histori Hubungan Indonesia-Australia

Hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Australia telah terjalin cukup lama dengan dimulai berdirinya kantor kedutaan besar Indonesia untuk Australia di Yarralumla, Canberra pada tahun 1971. Sejarah awal hubungan Indonesia-Australia bermula saat abad ke-17 pada bertemunya penduduk pribumi Australia dan para pelaut Indonesia yang berasal dari Makassar dalam perdagangan teripang di perairan utara Australia. Selama era kolonial, kedua wilayah mengalami pengaruh kolonialis Eropa oleh Inggris dan Belanda (Rundjan 2021). Setelah Perang Dunia II, Australia merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Australia negara yang giat mendukung kemerdekaan Indonesia dan mendukung rakyat Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari pemerintahan kolonial Belanda.

Dukungan yang diberikan tidak hanya berasal dari pemerintah Australia saja, tetapi penting juga mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Upaya yang dilakukan dalam ikut serta membantu adalah dengan cara perserikatan buruh dengan menggalang dana untuk membantu rakyat Indonesia. Para buruh juga melakukan aksi pemboikotan kepada 559 kapal perang dan dagang Belanda yang sedang berjalan membawa pemerintah kolonialnya ke Indonesia. Sikap yang dilakukan Australia sangat membantu rakyat Indonesia pada saat itu dan merasa mendapat dukungan moral tak hanya itu bantuan yang dilakukan Australia juga dengan konsisten menunjukkan sikap tidak setuju kepada Belanda dalam dua kali agresi militer (Ningsih 2022).

Sejarah hubungan antara Indonesia dan Australia berjalan dengan naik turun karena terdapat perbedaan dan sengketa di dalamnya. Australia dengan aktif mengawasi dan mengakui secara *de facto* kedaulatan Indonesia sejak Juli 1947. Pada tahun 1949 pascakemerdekaan Indonesia, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia resmi dibentuk, menciptakan akar untuk kerja sama yang lebih kuat di berbagai sektor (El -Haq dan El-Islam 2020).

Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui untuk membentuk komisi tiga negara (KTN). Indonesia minta Australia sebagai perwakilan ketiga negara Indonesia dalam penyelesaian sengketa, sedangkan Belanda memilih Belgia sebagai negara ketiganya dan Amerika sebagai negara ketiga bagi keduanya. Hasil akhir dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda dilakukan di atas kapal milik Renville sampai dengan Konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar berakhir pada 27 Desember 1949 dengan tercapainya pengakuan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. berkat bantuan negara penengah Australia dalam KTN tersebut. Australia juga menjadi co-sponsor Indonesia pada saat akan masuk menjadi anggota PBB di tahun 1950 (BBC News Indonesia 2017).

Hubungan yang terjadi antara kedua negara yakni Indonesia-Australia berjalan pasang surut. Sebab, hubungan yang awalnya baik berlangsung tidak lama, di tahun 1950 hingga tahun 1960an hubungan bilateral keduanya berjalan buruk. Australia mulai menunjukkan sikap menentang terhadap Indonesia diakibatkan kebijakan yang diambil oleh Indonesia saat kepemimpinan Presiden Soekarno yang berupaya untuk merebut kembali Irian Barat di tahun 1957-1963 dan juga isu konflik Malaysia di tahun 1963-1966. Adanya pergantian pemerintah di Australia,

Pada awalnya dipegang oleh partai buruh di bawah Perdana Menteri Joseph Benedict Chifley kepada pimpinan Robert Menzies oleh Partai Koalisi Liberal-Country pada saat 10 Desember 1949, dan mempengaruhi hubungan antar keduanya hingga tahun 1960 an (Thufail 2020)

Hal ini dikarenakan adanya perbedaan ideologi antara Koalisi Liberal *Country* dan Partai Buruh yang menjadikan merubah pandangan Australia terhadap Indonesia. Di tahun 1967 hubungan antara Indonesia-Australia mulai membaik kembali, dengan dibentuknya suatu konsorsium lembaga keuangan Internasional di tahun 1967, yaitu *Government Group on Indonesia* atau GGI. Dengan memiliki tujuan untuk membantu pembangunan di Indonesia. Di tahun berikutnya tepat di tahun 1968 dibentuk kembali *Cultural Agreement* yang bertujuan membantu program pertukaran di bidang pendidikan dan kebudayaan. Di tahun 1970an dilanjutkan kembali hubungan bilateral diantara kedua negara dengan diadakanya kunjungan antar kedua pemimpin negara tersebut (Wijayanti 2019).

Pada tahun 2005, Indonesia-Australia mengadakan *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* untuk dapat membantu memperkuat fondasi yang telah dibangun yakni kerja sama antar kedua negara. Joint Declaration telah diselenggarakan pascatragedi yang menimpa wilayah Aceh di tahun 2004 yakni tsunami. Australia membantu untuk memulihkan wilayah aceh dengan menyumbang biaya sebesar 45 miliar rupiah (kemenlu,2009).

Faktor pasang surutnya hubungan yang terjadi antar Indonesia dan Australia dikarenakan ada beberapa hal yakni kedekatan geografi di antara keduanya yang berbatasan langsung tidak menjamin berjalannya hubungan kedua dapat terjalin harmonis. Faktor kedua yakni perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi dan juga

budaya politik antar keduanya. Kebijakan politik luar negeri juga mempengaruhi dalam persepsi ancaman yang terjadi. Faktor lain seperti kurang kokohnya hubungan ekonomi kedua negara juga menjadi alasan. Kekhawatiran Australia terhadap kemampuan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Namun harus menanggung beban berat untuk membangun sebuah daerah seperti Irian Barat karena Australia khawatir akan menimbulkan komunisme di Indonesia. Serta perbedaan filosofi politik, dan sejarah nilai budaya yang mengalir antara keduanya yang menyebabkan memburuknya hubungan kedua negara tersebut (Wijayanti 2019).

Meskipun banyaknya lika liku yang dialami kedua negara tersebut usaha untuk meningkatkan hubungan bilateral antar keduanya terus dilakukan agar terus tumbuh kuat. Indonesia-Australia juga sepakat untuk dapat menyampingkan urusan yang dapat memicunya konflik. Sejak saat itu, hubungan antara Indonesia dan Australia terus berkembang, meskipun terkadang tetap mengalami tantangan dan perbedaan pendapat di beberapa isu, seperti hal keamanan regional, hak asasi manusia, dan lingkungan. Keduanya selalu berprinsip menjalin kerja sama yang erat di segala bidang, selalu memandang antar keduanya bisa menjadi partner tujuan bekerja sama dalam bidang apapun yakni politik ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dengan diiringi rasa percaya diri pada masing-masing pihak negara bahwasannya mereka adalah membutuhkan satu sama lain (Setyawati and Agussalim 2015).

2.2 Kerja sama Indonesia-Australia di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan

Tujuan dan fungsi hukum adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian mutlak dalam proses penegakan hukum. Hukum juga digunakan sebagai pencegahan dalam mengatasi kejahatan. Kerja sama bilateral Indonesia-Australia di bidang hukum bisa dilihat dari perjanjian yang telah disepakati oleh Indonesia-Australia yakni perjanjian ekstradisi sebagai bentuk upaya untuk pengembalian atau pemulangan seorang tersangka ataupun terpidana yang memilih melarikan diri keluar negeri. Ekstradisi adalah salah satu perantara hukum bagi kedua negara untuk bekerja sama dalam kejahatan yang bersifat lintas negara (*cross border crimes*). Perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Australia telah disepakati dan ditandatangani pada 22 April tahun 1992. Perjanjian ini telah diratifikasi dan diundangkan oleh pemerintah RI melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 1994 (Adittiya and Adrian 2022).

Ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan pelaku kejahatan. Dengan itu, negara tidak boleh melakukan tindakan penghukuman di negara lain, kecuali sudah tercantum dalam perjanjian ekstradisi. Kerja sama multilateral yang dilakukan Indonesia-Australia di bidang hukum dalam penanganan korupsi adalah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. UNCAC merupakan konvensi anti korupsi pertama yang bergerak secara global di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah mencegah dan memberantas korupsi dengan melakukan kerja sama internasional. Wajib bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC untuk

dapat menerapkan langkah-langkah anti korupsi secara meluas yang berdampak langsung pada undang-undang, institusi maupun pelaksanaan yang mana telah diatur dalam UNCAC yang terdiri dari 8 bab dan 71 pasal yang muatannya mengatur secara terperinci (I Gusti 2008). Indonesia telah meratifikasi UNCAC pada 18 April tahun 2006 dan diundangkan melalui Undang-Undang (UU) no 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. Dengan begitu Indonesia menjadi salah satu negara wajib mengimplementasikan peraturan yang tertera di UNCAC (Rizandi, Sinulingga, dan Permata 2022).

Setahun sebelumnya Australia lebih dulu telah meratifikasi UNCAC pada 7 Desember tahun 2005 (Parliament Australia 2012). Australia meratifikasi UNCAC karena menilai bahwa tindakan korupsi adalah suatu permasalahan serius yang dapat menghambat pertumbuhan perekonomian negara baik dalam jangka panjang, maupun pendek, melemahkan penegakan hukum, merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan merusak perkembangan manusia. Maka dari itu, upaya yang dilakukan Australia dengan meratifikasi UNCAC bertujuan agar dapat lebih meningkatkan kedisiplinan dan kerja sama yang lebih kuat antar negara, masyarakat sipil, lembaga nasional, internasional dan aktor non-pemerintah dalam pemberantasan korupsi (Aliffitria 2019).

Kerja sama ini dilakukan oleh Indonesia-Australia dalam keprihatinan atas meluasnya korupsi yang semakin hari menjadi virus. Hal ini secara tidak langsung mampu melumpuhkan pemerintah, mendiskreditkan lembaga publik dan perusahaan swasta, serta pemberian dampak buruk terhadap hak asasi manusia.

Demikian juga dapat melemahkan masyarakat serta pembangunan, khususnya yang berdampak pada masyarakat miskin.

Indonesia-Australia bertekad untuk mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi dengan melakukan perjanjian kerja sama di bidang hak asasi manusia dengan melakukan program pemerintah Australia ke-4 adalah program lima tahun (2011-2015) yakni *Australia-Indonesia Partnership Justice (AIPJ)*. Tujuan utama dari program ini untuk dapat memperkuat lembaga-lembaga di berbagai sektor hukum dan peradilan di Indonesia dengan menyumbang dana senilai AU\$50 juta agar menjadi lebih efektif dalam memberikan layanan informasi dan hukum yang mudah diakses, dapat diprediksi dan lebih hemat biaya. Dalam pelaksanaannya AIPJ sarannya lebih dispesifikan dan disempurnakan untuk dapat fokus pada hak-hak masyarakat Indonesia atas identitas hukum, ranah peradilan yang adil, informasi hukum yang mudah diakses terkhususnya pada perempuan miskin, anak-anak yang rentan dan penyandang cacat. Fokus yang dilakukan adalah untuk memenuhi tujuan utama dari bantuan Australia untuk hak-hak dasar dalam membantu masyarakat mengurangi dan mengatasi kemiskinan. AIPJ dikelola oleh pemerintah Australia yang berpusat di Kedutaan Besar Australia di Jakarta. AIPJ juga memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang sangat kuat berdasarkan kerangka kerja dan pedoman Pemerintah Australia (COLBRAN 2015).

Mengingat program ini merupakan program tahunan maka, program ini dilanjut pada tahun 2017-2025 dengan sebutan AIPJ2. Dengan diperpanjang 3 tahun hingga 2025. Program AIPJ2 memperluas lagi kerja sama antar lembaga pemerintah, termasuk lembaga peradilan seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), komnas nasional perempuan, dan komnas

perlindungan anak. Dalam AIPJ2 program ini sangat mendukung strategi dan tindakan dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui pendanaan untuk *Transparency International Indonesia* (TII). Serta memiliki strategi nasional dan melakukan upaya untuk dapat mencegah perkawinan anak usia dini, dengan advokasi tindakan lokal dan nasional terhadap perkawinan anak pada usia dini (Rahmadhani dan Sholeh 2021).

Dalam upaya melindungi keamanan nasional kerja sama antara Indonesia-Australia penting untuk terus dilakukan. Kerja sama yang dilakukan Indonesia-Australia dalam menjaga pertahanan dan keamanan melalui nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia-Australia terhadap mengatasi kejahatan lintas negara. Dengan melakukan kerja sama dengan kepolisian antara kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dan Kepolisian Federal Australia (AFP) pada 13 Juni 2002 yang di setiap tiga tahun dengan dilakukan perpanjangan berkala apabila kerja sama tersebut ingin untuk dilanjutkan. Kerja sama ini dilakukan untuk upaya penanganan preventif terkait kejahatan lintas batas negara dengan operasi gabungan, intelijen dan melakukan pertukaran informasi. Selain itu juga Membuat kantor penghubung yang berfungsi untuk penempatan perwira penghubung, pengembangan kapabilitas dalam institusi sumber peralatan dan sumber daya manusia sesuai yang telah disepakati dalam rencana aksi perjanjian kerangka kerja sama keamanan antara Republik Indonesia-Australia (Ansari 2016).

Dalam hubungan bilateral kedua negara berlanjut dalam pertahanan keamanan ditandai juga dengan pengiriman surat oleh Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer tentang prioritas utama Australia dalam perjanjian keamanan bilateral Indonesia-Australia pada bulan Juli tahun 2005 dan diterima

langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda. Perjanjian keamanan bilateral Indonesia-Australia telah ditandatangani dan disepakati pada Agustus tahun 2006 di Jakarta dan pada bulan September tahun 2006 di Canberra yakni perjanjian (*Agreement Between the Government of the Republic Indonesia dan Government of Australia of Framework for Security Cooperation*) dan telah diratifikasi pada 13 November tahun 2006 oleh Menteri Luar Negeri Australia yang sedang menjabat saat itu yakni Alexander Downer dan juga Menteri Luar Negeri Indonesia yakni Hassan Wirajuda (Wahyuningtyas 2016)

Kerjasama bilateral kedua negara juga dilakukan pada sektor keamanan penerbangan yakni Indonesia *Australia Aviation Security Project* (IAAP) yakni dengan pengembangan sumber daya manusia, terkhususnya untuk para personil keamanan penerbangan. Program IAAP merupakan program yang dilakukan oleh Pemerintah Australia, dengan memberikan pemahaman dan juga pengenalan terhadap masalah regulasi tentang bagaimana keamanan dalam penerbangan (Indonesia Embassy 2010). Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk *workshop, joint airport*, dan pemberian pelatihan dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas personil keamanan penerbangan di Indonesia demi menciptakan kualitas penerbangan Indonesia semakin aman dan baik. Hal ini memberikan keuntungan bagi Australia karena dapat meningkatkan jumlah wisatawan datang ke Australia, dengan disertai penambahan penerbangan dapat menjamin keamanan penumpang termasuk bagi warga negara sipil Australia (Laksmi 2017).

Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia menjalin kerjasama dengan Australia di bidang keamanan, mencegah terorisme dan juga stabilitas Indo-Pasifik. Hal ini semakin difokuskan oleh Jokowi saat memasuki pemerintahannya di

periode kedua dalam bentuk kerja sama komprehensif yakni pembuatan perjanjian *Defence Cooperation Agreement (DCA)*. Kedua, dibentuk nya *dominance denial dengan* bersikap boleh berpengaruh namun tidak mendominasi, memanfaatkan upaya *power* negara lain di regional dalam melakukan balancing yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan Australia (Ghalib 2023).

Hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia-Australia telah terbentuk sejak lama. Australia yang melihat Indonesia sebagai sebuah negara potensial yang dapat memberikan manfaat terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional Australia. Salah satu bentuk realisasi dari upaya kerja sama pertahanan dan keamanan Indonesia-Australia adalah melalui program *Defence Cooperation Agreements (DCA)*. DCA merupakan perjanjian kerja sama pertahanan dan keamanan antara Indonesia-Australia. Peningkatan kerja sama DCA dalam konferensi itu mengarah pada pengembangan kerja sama komprehensif dan strategis yang menggabungkan fokus isu pertahanan tradisional dan non-tradisional Indonesia-Australia. Kesepakatan itu kemudian ditandatangani oleh Jokowi dalam sebuah nota kesepahaman atau *MoU* yang termasuk bidang kontra terorisme, serta pertahanan dan keamanan siber serta terhadap kerja sama menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik (KSM Defensia 2022).

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, bidang pendidikan memiliki berbagai sasaran, seperti angka partisipasi pendidikan, memberantas adanya kesenjangan pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesiapan siswa di dunia industri, serta turut menciptakan kesejahteraan guru (Murdiyana dan Mulyana 2017). Hubungan kerja sama bilateral Indonesia-Australia telah menghasilkan berbagai kesepakatan kebijakan dan kerja sama untuk kedua negara.

Kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang pendidikan adalah Innovation for Indonesia's School Children (INOVASI).

Program INOVASI ini bertujuan untuk mencari tahu metode apa yang tepat untuk digunakan oleh guru dan siswa dalam capaian peningkatan pendidikan di Indonesia. INOVASI berjalan dengan berkolaborasi bersama pemerintah Indonesia dan pemangku jabatan lainnya dalam memantau perubahan yang dapat diidentifikasi dalam sistem pendidikan Indonesia. INOVASI berjalan dengan mengedepankan eksperimen dalam penerapan metode pembelajaran dan mengumpulkan data timbal balik dari eksperimen yang diterapkan untuk mengetahui efektivitas dari program tersebut. Program INOVASI berhasil meningkatkan jumlah kapasitas kualitas guru di provinsi dalam mengajar. INOVASI juga menyumbang buku dengan jumlah puluhan ribu dalam upaya meningkatkan literasi siswa (Alfiano, Hergianasari dan Simanjuntak 2022)

Kerjasama lain di bidang pendidikan yang dilakukan Indonesia-Australia adalah Indonesia-Australia membentuk kerjasama di bidang pendidikan pada yakni Australian Agency for International Development (AusAID) pada tahun 2018. AusAID merupakan bantuan luar negeri Australia terhadap berbagai negara di berbagai kawasan, terkhususnya seperti di kawasan Pasifik. Berdasarkan letak dan posisi geografis kawasan Pasifik, Pasifik Selatan, merupakan tetangga dekat (Brown 2012). Kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh Australia fokus dalam bidang pendidikan untuk membantu negara berkembang dan negara yang fokus dalam mengatasi berbagai persoalan seperti ekonomi, sosial, pembangunan dan lingkungan (Rifaldy 2020).

Dari data hasil penelitian, menjelaskan hubungan kerja sama bilateral yang terjalin antara Indonesia-Australia, dibuktikan dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui AusAID melalui berbagai capaian seperti tersedianya infrastruktur, akreditasi sekolah yang baik, memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik, dan menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai (Alfiano et al. 2022). AusAID telah membantu guru dalam mengembangkan inovasi metode pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan siswa. Dalam upaya meningkatkan pembelajaran pada tahun 2018, Australia mengadakan pelatihan untuk 2774 guru dan 446 tenaga pendidik dari jumlah 907 sekolah (Department of Foreign Affairs and Trade, 2019).

Ada beberapa hasil yang dapat dirasakan dalam program AusAID ini adalah fasilitas konstruksi sekolah memiliki standar kualitas tinggi yang telah dibangun dengan baik, didukung oleh fungsi bangunan yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, bagian dari program AusAID adalah adanya ProDEP yang juga memiliki dampak dalam pengaplikasian pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah dan untuk tenaga pendidik. AusAID juga berkontribusi dalam membantu dalam menerapkan model peningkatan kualitas di 2000 madrasah pada daerah Jawa Tengah (Alfiano et al. 2022).

2.3 Kasus Buronan Korupsi Indonesia di Australia

Permasalahan korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas yang dimiliki Indonesia (Pusat Edukasi Anti Korupsi 2022). Dampak dari tindak pidana korupsi juga dapat memberikan kerugian pada masyarakat seperti pelayanan-pelayanan publik yang tidak membaik, pelayanan kesehatan yang semakin mahal, biaya menempuh pendidikan yang mahal, membuat pajak kian membesar setiap tahunnya hal ini dapat mendorong kemiskinan. Apabila hal ini terus menerus terjadi maka akan membuat Indonesia tidak lagi menjadi posisi yang strategis sehingga tidak dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dan tidak dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat (Adelini, Heliana, dan Aryanto 2019).

Dengan tidak bertanggung jawab pada bangsa dan negara, perbuatan yang dilakukan para buron koruptor ini merupakan salah satu potensi yang dapat merusak perekonomian negara. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemangku jabatan. Dalam pemrosesan kasus korupsi di negara asal juga dapat terhenti atau sulit dilanjutkan tanpa kehadiran koruptor tersebut. Akibatnya memperlambat atau menghentikan proses hukum, terutama jika ada kebutuhan untuk pemeriksaan langsung dan partisipasi koruptor dalam persidangan.

Adrian Kiki Ariawan dijatuhkan hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam sidang *in absentia* pada 2 Juni 2003. Adrian Kiki Ariawan merupakan mantan Direktur Utama Bank Surya yang kabur ke Australia dan pindah kewarganegaraan di sana. Majelis hakim menyatakan bahwa Adrian Kiki Ariawan terbukti bersalah atas korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

untuk Bank Surya, kerugian negara akibat yang dilakukan Adrian sebesar Rp1,515 Triliun. Putusan tersebut bernomor 71/PID/2003/PT.PDKI (Prabowo 2014).

Adrian Kiki Ariawan diketahui kabur ke Australia pada 8 Juli 2002 yakni pada saat sidang yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Adrian Kiki Ariawan berhasil ditangkap oleh Kepolisian Australia Perth pada tanggal 28 November 2008. Indonesia meminta ekstradisi kepada Australia meskipun Adrian sempat mengajukan permohonan kepada Australia agar tidak diekstradisi ke Indonesia, tetapi akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia di Perth International Airport. Penyerahan Adrian paling lambat dapat dilakukan sampai 16 Februari 2014 (HukumOnline.Com 2013).

Selanjutnya buron koruptor yang kabur ke Australia yakni Hendra Rahardja yang dijatuhi hukuman seumur hidup dalam persidangan *in absentia* atau tanpa kehadiran terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 Maret 2002. Hendra Rahardja adalah Komisaris Utama dan Pemilik PT Bank Harapan Sentosa (BHS). Hendra dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak korupsi dalam dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Bank Harapan Sentosa (BHS), Akibat yang dilakukan Hendra negara mendapatkan kerugian sebesar Rp305 miliar dan US\$ 2,3 juta (Liputan6.com 2002).

Namun sayang semasa proses ekstradisi masih berjalan Hendra meninggal dunia di Australia pada 26 Januari 2003 di usia 59 tahun. Karena terdakwa telah meninggal hukum pidananya ditutup namun hukum perdata dan kerja sama pemerintah Indonesia-Australia tentang pengembalian aset dan harta terdakwa terus berjalan (Liputan6.com 2003).

Masih dalam kasus yang sama Eko Edi Putranto putra Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja, Eko Edi Putranto merupakan Mantan Komisaris PT Bank Harapan Sentosa (BHS) melarikan diri ke Australia setelah dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun dengan sidang berlangsung dengan *in absentia* atau tanpa kehadiran terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 November tahun 2002. Atas korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Surya, (Indonesia.Corruption.Watch,2007). Kerugian negara akibat yang dilakukan Eko Edi Putranto sebesar 2,6 Triliun dengan denda 30 juta dan wajib membayar uang pengganti Rp1,950 triliun (Antara.News.Com 2006).

Lalu ada buron keempat yakni Adelin Lis yang kabur melarikan diri ke Australia yakni Adelin Lis divonis hukuman penjara selama 10 tahun. Adelin Lis merupakan pengusaha nasional di bidang kehutanan sekaligus pemilik dari PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia. Adelin Lis dinyatakan bersalah dalam melakukan tindakan korupsi dalam kasus penebangan liar di hutan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Hakim menyatakan Adelin Lis harus membayar denda Rp1 miliar atau hukuman pengganti enam bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp119,8 miliar dan US\$ 2,938 juta (Indonesia Corruption Watch 2009).

2.4 Sikap Indonesia Terhadap Stabilitas Indo-Pasifik Dengan Kerja Sama Indonesia-Australia

Dalam beberapa dekade terakhir istilah Indo-Pasifik terus dibahas dalam diskusi strategis yakni seperti dalam pembahasan di Indonesia, Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan India. Indo-Pasifik melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai satu linear zona maritim yang terciptanya kebijakan luar negeri dan pertahanan (Scott 2019). Pemaknaan dari wilayah Indo-Pasifik muncul bukan karena pada wilayah regional yang terbentuk oleh integritas kawasan regional, seperti halnya Asia Tenggara atau Asia dan Eropa (Medcalf 2014). Indo-Pasifik merupakan perkembangan isu baru di politik internasional, Dengan mengacu pada konstruksi tatanan keamanan yang mengedepankan kepentingan maritim (Kitaoka 2019). Indo-Pasifik memainkan hampir seluruhnya sebagai konstruksi maritim daripada kontinental (Yanuarti, Wibisono, dan Midhio 2020). Oleh sebab itu, negara yang ikut terlibat semakin bertambah dengan konstruksi Indo-Pasifik. Setiap negara harus menghadapi mengatasi masalah koordinasi serta pembagian beban apabila konsep kebijakan luar negerinya ingin memiliki posisi strategis.

Pada saat negara dihadapkan oleh kepentingan nasional, maka negara harus melakukan upaya strategi kalkulus mengingat kepentingan dari setiap negara cenderung berlawanan dengan kepentingan nasional negara lain (Utami dan Kurniawati 2017). Dengan kata lain yakni *struggle of interest* akan menjadi tema diskusi besar dalam setiap interaksi antar negara, selain kerja sama yang bersifat keseluruhan. Keterlibatan banyak negara dalam kawasan indo-Pasifik menjelaskan tidak hanya perubahan nilai strategis kawasan Indo-Pasifik saja, namun juga menjadi wilayah kompetisi distributor kekuatan antar negara (Saeed 2017).

Hal ini terlihat pada ketegangan yang terjadi pada AS dan Tiongkok dengan mempunyai pusat gravitasi geografis di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok memiliki kekuatan yang sama di Indo-Pasifik, Sehingga persaingan AS dan Tiongkok akan terasa lebih tajam di kawasan Indo-Pasifik (Wangke 2020). Faktor perbedaan kepentingan antar kedua negara dan juga perebutan kekuasaan juga memicu konflik kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini apabila tidak ditangani dengan serius akan menimbulkan perang terbuka dan ketidakstabilan yang panjang. Jika tidak mereda dari ketegangan AS dan Tiongkok akan sangat mengganggu perdagangan internasional, mengganggu kerja sama multilateral dan keterlibatan dunia. Indonesia mengandalkan kerja sama multilateral dalam mencapai tujuan negara Indonesia akan terpengaruh dan menyulitkan Indonesia dalam menentukan pilihan (Wangke 2020).

Melihat konflik yang terjadi di Kawasan Indo-Pasifik Indonesia-Australia bekerja sama untuk menjaga kunci stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik. Pada kawasan ini mungkin memiliki masa depan tidak pasti namun, akan menghadapi persaingan antara negara besar. Perang dagang AS-Tiongkok secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada perluasan sektor, termasuk keamanan. Pemerintah Donald Trump telah menyatakan Tiongkok sebagai pesaing strategis jangka panjang dan pada Pemerintah AS telah mengambil respons yang lebih proaktif dalam tindakan Tiongkok. Belt and Road Inisiatif dan dengan kebijakan AS yang lebih “mengutamakan Amerika” merupakan sebuah elemen perang dagang yang telah dideklarasikan secara terbuka oleh kedua negara. Negara-negara seperti Perancis, Inggris, India dan Jepang semakin nampak terlibat dalam persaingan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Potensi adanya destabilisasi sangat

besar, dan Indonesia-Australia mempunyai peran penting dalam bekerja sama untuk membantu menjaga stabilitas. Indonesia dan Australia bekerja sama untuk mendorong seluruh negara di kawasan Indo-Pasifik agar berkomitmen menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian dengan berpegang teguh keterbukaan (Swastanto 2019).

Dalam peran menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik Indonesia-Australia bekerjasama dengan melakukan pelatihan pertahanan maritim dengan tujuan menjaga stabilitas kawasan, mengamankan kedaulatan teritorial, dan memperkuat hubungan kedua mitra pertahanan. Latihan patroli terkoordinasi AUSINDO CORPAT dan latihan angkatan laut dengan melibatkan kapal perang dari kedua negara menunjukkan upaya peran peningkatan keterlibatan dalam penguatan sistem maritim. Iterasi ke-10 AUSINDO CORPAT dilakukan pada Desember 2020 tepatnya di perairan antara Indonesia dan Australia demi meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan laut. Patroli melibatkan tiga kapal perang - HMAS Wollongong dari Angkatan Laut milik Australia dan KRI Lemadang dan KRI Pandrong dari TNI Angkatan Laut. Patroli ini menargetkan kepada ancaman keamanan maritim, ancaman laut China Selatan, dan di sekitar kawasan Indo-Pasifik dengan pengumpulan dan pembagian informasi di antara Indonesia-Australia. Dengan lebih banyak latihan bersama maka akan lebih banyak transfer teknologi, pengembangan kemampuan, pengembangan intelijen dan pertukaran informasi antara Indonesia-Australia maka akan besar kemungkinan untuk menemukan hasil dari pembaruan strategis pertahanan. Terlebih dengan berkembangnya jangkauan strategis dari Tiongkok ke Laut China Selatan dan

Samudera Hindia menjelaskan pembaruan pertahanan Indonesia-Australia terus ditingkatkan (Abke 2021).

Indonesia-Australia juga berkontribusi berperan menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan dengan membantu menyatukan pendekatan-pendekatan dengan memposisikan diri sebagai penghubung antara ASEAN dan AS dengan menyepakati landasan bersama dalam mengakomodasi kepentingan bersama. Meskipun ASEAN dan AS memiliki pandangan yang berbeda namun keduanya tetap simpatik terhadap masa depan di kawasan Indo-Pasifik (Swastanto 2019).

BAB 3

PERAN INDONESIA DI KAWASAN INDO-PASIFIK

3.1 Peran Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia di kawasan Indo-Pasifik melalui *Ego Role Conceptions*.

Pada saat negara dihadapkan oleh kepentingan nasional, maka negara harus melakukan upaya strategi kalkulus mengingat kepentingan dari setiap negara cenderung berlawanan dengan kepentingan nasional negara lain (Utami dan Kurniawati 2017). Dengan kata lain yakni *struggle of interest* akan menjadi tema diskusi besar dalam setiap interaksi antar negara, selain kerja sama yang bersifat keseluruhan. Keterlibatan banyak negara dalam kawasan indo-Pasifik menjelaskan tidak hanya perubahan nilai strategis kawasan Indo-Pasifik saja, namun juga menjadi wilayah kompetisi distributor kekuatan antar negara (Saeed 2017).

Hal ini terlihat pada ketegangan yang terjadi pada AS dan Tiongkok dengan mempunyai pusat gravitasi geografis di kawasan Indo-Pasifik. AS dan Tiongkok memiliki kekuatan yang sama di Indo-Pasifik, Sehingga persaingan AS dan Tiongkok akan terasa lebih tajam di kawasan Indo-Pasifik (Wangke 2020). Faktor perbedaan kepentingan antar kedua negara dan juga perebutan kekuasaan juga memicu konflik kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini apabila tidak ditangani dengan serius akan menimbulkan perang terbuka dan ketidakstabilan yang panjang. Jika tidak mereda dari ketegangan AS dan Tiongkok akan sangat mengganggu perdagangan internasional, mengganggu kerja sama multilateral dan keterlibatan dunia. Indonesia mengandalkan kerja sama multilateral dalam

mencapai tujuan negara pasti akan terpengaruh dan menyulitkan Indonesia dalam menentukan pilihan (Wangke 2020).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk dapat menjadi poros maritim dunia. Tujuan poros maritim dunia menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, mewujudkan kepentingan nasional, perdamaian, keamanan maritim dan kesejahteraan global. Dalam hal ini Indonesia berperan untuk pembangunan proses dari infrastruktur, politik, sosial dan budaya. Tidak hanya itu penegakkan kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penguatan kerja sama maritim, pengelolaan hayati agar tetap lestari, dan menjaga laut, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kelautan juga turut dilakukan. Hal ini yang dapat membantu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia (Kominfo Indonesia Terkoneksi 2016).

Hubungan kerja sama bilateral Indonesia-Australia tidak dapat terjalin apabila hanya mengutamakan keuntungan bagi kepentingan nasional yang pragmatis, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan yang strategis bagi Indonesia-Australia yang lebih luas. Indonesia-Australia berada di lingkungan yang strategis yang menjadi perebutan pengaruh bagi negara berkekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Seiring bertambahnya waktu pertumbuhan ekonomi terus berjalan didukung dengan kekuatan militer yang semakin canggih. Dengan kekuatan yang dimiliki, Tiongkok terus memperluas kerja sama dan pengaruhnya ke berbagai negara di kawasan Indo-Pasifik (Roza 2021).

Beberapa tahun terakhir sikap Tiongkok semakin koersif dalam klaim wilayah Laut China Selatan (LCS). Hal ini membuat kekhawatiran bagi negara

sekitar perbatasan atas terbatasnya akses dan pengaruh kuat yang dimiliki Tiongkok. Dalam hal ini Amerika Serikat masih menyatakan komitmen untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan negara di kawasan Indo-Pasifik. Dengan kebijakan luar negeri yang ditetapkan AS banyak mempengaruhi kebijakan luar negeri di berbagai negara termasuk Australia (Roza 2021).

Perebutan pengaruh kekuasaan menjadi isu yang tidak bisa dihindarkan bagi Australia, terlebih posisi Australia sebagai sekutu penting AS di kawasan Indo-Pasifik. Meluasnya pengaruh yang dilakukan Tiongkok semakin membuat keraguan atas kapasitas AS mengimbangi Tiongkok yang menyebabkan menurunnya pengaruh strategis Australia di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, muncul kekuatan-kekuatan lainnya seperti India di kawasan Samudera Hindia juga semakin melemahkan posisi Australia. Hal ini mendesak Australia untuk dapat berperan lebih aktif di kawasan Indo-Pasifik dalam memperoleh kembali pengaruhnya. Dalam hal ini Indonesia telah menunjukkan sikap konsisten untuk tidak memihak pada salah satu kekuatan besar. Sikap konsisten Indonesia menjadikan Indonesia sebagai kekuatan penting bagi dua kekuatan tersebut (Roza 2021).

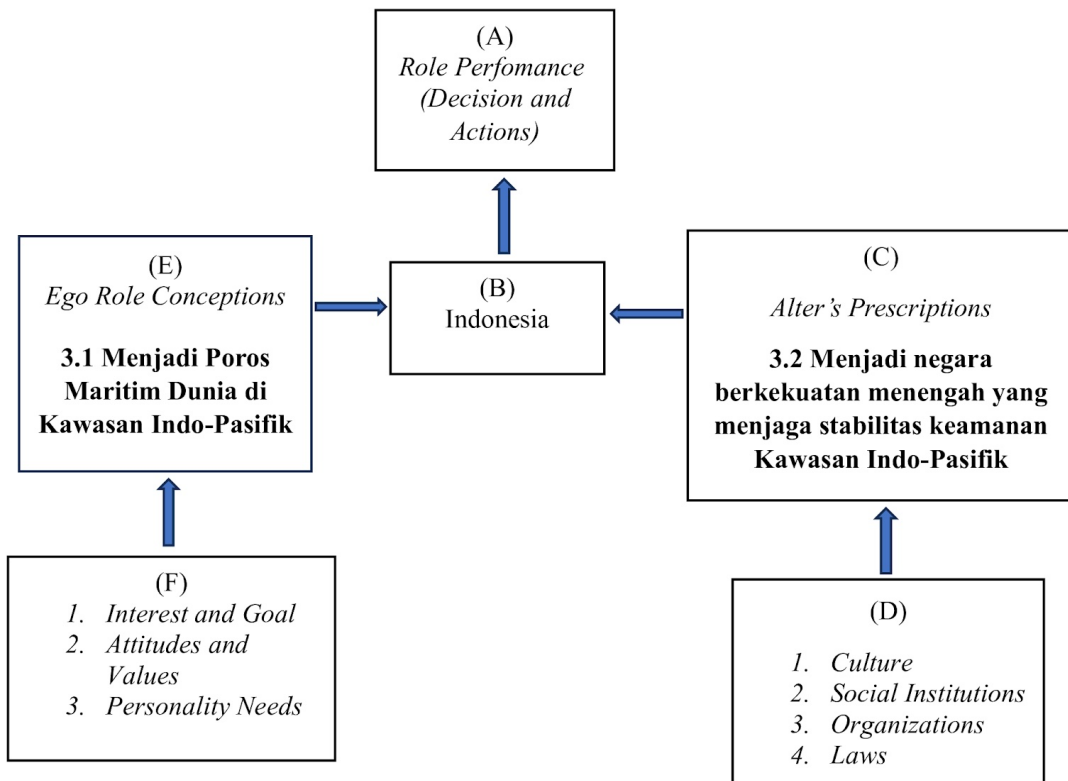
Dalam upaya menjaga pertahanan antara Indonesia-Australia diwujudkan dengan menandatangani pembaruan dari *Defence Cooperation Arrangement* (DCA) pada pertemuan di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto menjelaskan eratnya hubungan antara Indonesia-Australia yang sudah terjalin sejak lama. DCA merupakan dokumen penting untuk menjadi payung kerja sama pertahanan komprehensif Indonesia-Australia di masa mendatang. Upaya meningkatkan kesepakatan DCA yang lebih

kuat bagi kerja sama Indonesia-Australia dalam kerangka kemitraan yang strategis (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2021).

Gambar 1. 2. Implementasi Role Theory and the Sources of Human Behavior dalam Peran Politik Luar Negeri Era Joko Widodo dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik

Sumber : KJ. Holsti ‘National Role Conception in the Study of Foreign Policy’ (1970)

3.1.1 Interest and Goal



Landasan tingkah laku manusia, menurut teori peran K.J Holsti, adalah posisi dan norma dan harapan perubahan proyek pada posisi tersebut. Peran nasional para pengambil kebijakan serta keputusan dan tindakan kebijakan luar

negeri mereka juga dipengaruhi atau didorong oleh lingkungan internal dalam suatu negara. *Interest and Goal* meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, ada minat yang Indonesia miliki untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Peran Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik adalah mengembangkan infrastruktur maritim, memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik, meningkatkan kapasitas keamanan maritim, dan memperkuat diplomasi maritim. Pernyataan Indonesia sebagai poros maritim dunia dibagi menjadi dua tujuan yang saling berkaitan. Yaitu di tingkat eksternal dan internal, Di tingkat eksternal penegasan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan suatu langkah awal menuju deklarasi rencana kerja sama di kawasan Indo-Pasifik selanjutnya. Di tingkat internal atau domestik, Indonesia ingin dapat memperkuat klaimnya sebagai kekuatan maritim dunia dengan cara membangun konektivitas antar pulau demi adanya interaksi yang lebih efisien dan mewujudkan kesejahteraan bersama (Hutomo et al. 2023).

Upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan melakukan inisiatif untuk melakukan kerja sama Indo-Pasifik dengan mengedepankan perdamaian internasional, menjaga stabilitas kawasan, dan kemakmuran bersama. Inisiatif yang dilakukan Indonesia adalah sikap Indonesia untuk memperluas bidang diplomasi sejalan dengan prinsip UNCLOS untuk dapat dipertahankan tidak hanya demi kepentingan kedaulatan maritim Indonesia saja namun juga keharusan bagi sebuah negara (Agastia 2020). Dalam upaya mengoptimalkan perannya dalam kawasan

Indo-Pasifik, Pada tahun 2014 Indonesia membuat kebijakan *Global Maritime Fulcrum* (GMF). Tujuan pembuatan kebijakan ini adalah untuk memanfaatkan potensi maritim Indonesia dan meningkatkan posisinya sebagai poros maritim dunia. Dalam ranah kawasan Indo-Pasifik, GMF berperan penting dalam kontribusi mengatasi masalah keamanan, kerja sama maritim dan tata kelola laut yang berkelanjutan. Indonesia berupaya untuk dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan bagi negara-negara tetangga, menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik dan gencar mensosialisasikan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik (Hutomo et al. 2023).

Kunci dari implementasi poros maritim dunia secara mendasar peran mewujudkan poros maritim dunia adalah mendukung cita-cita Jokowi dengan diwujudkan melalui konsep tol laut dalam lima tahun ke depan. Tol laut merupakan jalan tol yang menghubungkan hampir seluruh pelabuhan di Indonesia. Dengan adanya tol laut diharapkan dapat lebih memudahkan masyarakat Indonesia yang berada di pelosok nusantara tidak lagi mengalami kelangkaan komoditas, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat dan pemerataan distribusi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia maupun penduduk. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar serta adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi secara merata merupakan alasan lainnya terbentuknya Tol Laut Indonesia. Dalam implementasinya terdapat enam jalur tol laut dari barat hingga timur Indonesia, Sebab Pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai simpul tautan laut dengan jumlah 47 dukungan pelabuhan nonkomersial serta 41 pelabuhan dalam proses Pembangunan (Aufiya 2017).

Kawasan Indo-Pasifik rentan terhadap persaingan kekuatan besar yang memiliki kepentingan geostrategis dan kepentingan negara masing-masing. Kepentingan geostrategis dibuktikan oleh dibentuknya kebijakan luar negeri era Joko Widodo sebagai salah satu strategi Indo-Pasifik Indonesia sebagai meneruskan visi wawasan nusantara (Aufiya 2017). Kawasan Indo-Pasifik memiliki peranan penting tidak hanya dalam segi politik, tetapi juga sebagai tempat untuk negara-negara di sekitar wilayah tersebut menunjukkan kekuatan angkatan laut dan kedaulatannya. Kawasan Indo-Pasifik juga memiliki potensi geoekonomi yang besar, menjadikannya penting dalam bidang keamanan internasional maupun keamanan non-tradisional (Hutomo et al. 2023).

3.1.2 Attitudes and Values

Attitudes and Values merupakan prinsip dan nilai yang sudah ada dalam suatu negara menjadikan tujuan dari para pembuat keputusan. Kerja sama Indonesia terutama pada kawasan Indo-Pasifik menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Hal ini sejalan dengan visi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berpacu pada arah pembangunan pertahanan negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2021). Prinsip dan nilai-nilai yang telah dipegang Indonesia dalam mengambil kebijakan politik luar negeri dengan berpegang teguh bebas aktif. Hal ini telah dibangun kokoh, Ideologi yang mengedepankan nilai-nilai yang tercantum pada lima sila Pancasila. Status Indonesia sebagai pemimpin *de facto Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dengan prinsip bebas aktif yang menjadi prinsip utama dalam mengambil kebijakan luar negeri kemudian memiliki peran penting dalam pembentukan strategi Indo-Pasifik Indonesia (Haryanto 2014).

Menurut Mochtar Kusumaatmaja bebas yang berarti Indonesia tidak memihak terhadap kekuatan manapun. Aktif memiliki arti menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia namun tidak bersifat pasif terhadap isu internasional melainkan bersifat aktif (Kusumaatmadja 1983). Hal ini ditegaskan dengan pidato Mochammad Hatta yakni “Tidak ada kata lain, Indonesia tetap tidak memihak baik blok Soviet maupun Sekutu” Pidato itu juga kemudian dikenal dengan “Mendayung di antara dua karang”, merupakan akar penting deklarasi Indonesia atas politik bebas aktif (Haryanto 2014).

Prinsip bebas aktif mengacu pada upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengutamakan sikap netral dan memuliakan kesetaraan hak individu terhadap negara berkonflik. Langkah Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan nasional dapat dicapai dengan tanpa memihak blok manapun (Haryanto 2014). Indonesia menerapkan strategi *indirect balancing* melalui kerja sama pertahanan dengan Australia sebagai aktor eksternal. Namun, Indonesia juga tetap menjalin kerja sama dengan Tiongkok (Ghalib dan Iskandar 2023).

Selain itu, didalam negeri Indonesia juga memiliki nilai yang dimiliki dalam upaya praktik operasi yang meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memajukan perekonomian Indonesia dan sosialnya di masyarakat tempat suatu perusahaan beroperasi yakni *creating shared value* (Sharing Value). Konsep dari *sharing value* ini bertumpu pada meningkatkan daya saing perusahaan dengan sekaligus memajukan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat tempat beroperasinya perusahaan. Sebagai strategi bisnis, *Sharing Value* berfokus pada memperluas hubungan antara kemajuan sosial dan ekonomi (Share Value Indonesia 2022). *Sharing Value* menekankan pentingnya memasukkan masalah dan

kebutuhan sosial dalam perencanaan strategi sebuah perusahaan. Untuk melancarkan kebijakan ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk dapat membantu mengoptimalkan potensi lokal, mewujudkan kemandirian dan bermuara pada kesejahteraan (Setiawan 2019). Nilai yang dipegang Indonesia dengan penerapannya pada sharing value mengatur ulang batas-batas kapitalisme, dengan menghubungkan kesuksesan perusahaan pada peningkatan masyarakat yang lebih baik. Hal ini membuka banyak peluang untuk melayani kebutuhan baru, mendapatkan efisiensi, dan memperluas pasar. Sharing Value berlaku sama pada ekonomi maju dan negara berkembang, meskipun peluang lebih spesifiknya akan berbeda. Pada setiap perusahaan dan industri akan sangat berbeda namun setiap perusahaan akan memilikinya. Sharing Value menciptakan keuntungan dengan melibatkan nilai bersama, sehingga perusahaan dan masyarakat bisa tumbuh bersama-sama (Share Value Indonesia 2022).

3.1.3 Personality Needs

Personality Needs merupakan sebuah kepentingan nasional merupakan tujuan, pencapaian, ataupun preferensi kebijakan yang dibuktikan dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri dengan memiliki tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu negara. Kepentingan nasional Indonesia secara umum sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2023).

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan alat untuk dapat mencapai kepentingan nasional di ranah internasional. Peran aktif suatu negara dalam forum-forum internasional memiliki manfaat dapat meningkatkan citra positif sehingga menimbulkan kepercayaan untuk menjalin suatu kerja sama. Pada masa pemerintahan Joko Widodo peran yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya di tengah konflik regional Indo-Pasifik seperti menerapkan kebijakan yang bersifat *inward looking*. Indonesia di era Joko Widodo menekankan pada orientasi dan strategi yang berpegang pada kepentingan nasional. Hal ini dibuktikan dengan upaya penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia (Widiatmaja dan Albab 2019). Hal ini bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, sekaligus wujud nyata upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi poros maritim yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut (Istanto 2015).

Indonesia berperan aktif di forum-forum internasional seperti Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Terkait kerja sama APEC, Indonesia bersama seluruh anggota APEC telah berkomitmen di berbagai bidang diantaranya mempercepat pengembangan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta menciptakan keamanan, ketahanan dan akses di kawasan Indo-Pasifik (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2023). Indonesia juga aktif dalam beberapa inisiatif di forum G20, seperti Indonesia memiliki peran sebagai satu-satunya negara ASEAN di G20, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu jembatan bagi negara-negara ASEAN lainnya (Larasasati and Natasya 2018). Indonesia berperan memberi dukungan

terhadap negara berkembang untuk mengamankan anggaran nasional dalam krisis likuiditas global infrastruktur dan Indonesia juga mendukung konektivitas melalui kooperasi dan pertukaran pengetahuan (G20 Pedia 2022).

Indonesia juga aktif dalam forum Indian Ocean Rim Association (IORA). Indonesia berperan sangat penting dalam forum IORA yakni sebagai ketua area kerja sama prioritas pengelolaan perikanan. Area kerja sama ini membawahi IORA *Core Group on Fishseries Management (CGFM)*. Hal ini menjadi penanda *outward looking* masa pemerintahan Joko Widodo dengan aktif di berbagai forum internasional untuk membuat citra positif di berbagai negara (Widiatmaja dan Albab 2019).

Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam forum multilateral lainnya seperti Forum Kepulauan Pasifik (PIF). PIF beranggotakan 18 negara Pasifik, Indonesia ikut serta sebagai mitra wicara (Kominfo 2023). Tekad keinginan Indonesia aktif dalam peran Indo-Pasifik melalui PIF disampaikan pada pertemuan tingkat menteri ASEAN oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Indonesia akan terus bekerja sama menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Penguatan kerja sama dengan negara-negara Indo-Pasifik merupakan salah satu prioritas dari politik luar negeri Indonesia.

Hal ini dibuktikan pada tahun 2022 Indonesia mengadakan *Indonesia Pacific Forum for Development (IPFD)* yang pertama pada 7-8 Desember 2022. Inisiatif strategi yang dilakukan Indonesia akan menjadi tonggak sekaligus platform Indonesia dalam mengembangkan kerja sama pembangunan secara terlembaga di kawasan Indo-Pasifik (Antara Berita Indonesia 2022). Pada forum ini menjembatani negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dengan lembaga-lembaga

terkait di Indonesia dan mitra pembangunan yang berpotensi lainnya. Indonesia ingin menciptakan platform kerja sama untuk menarik mitra pembangunan terhadap proyek-proyek yang lebih spesifik terhadap negara masing-masing di kawasan Indo-Pasifik (Antara Berita Indonesia 2022).

3.2 Peran Indonesia Menjadi Negara Berkekuatan Menengah yang Menjaga Stabilitas Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik.

Pengertian dari *middle power* atau negara berkekuatan menengah adalah istilah untuk penyebutan negara dalam spektrum kekuatan internasional yang berada pada posisi tengah dan berada di bawah negara adidaya atau *super power* (Humas Unpar 2023). Konsep negara berkekuatan menengah dijelaskan sebagai negara yang dapat memainkan peran penting secara regional serta dapat memberikan pengaruh pada tingkat tertentu pada urusan global, meskipun bukan termasuk termasuk sebagai negara kekuatan global utama (Sudjatmiko dan Yayusman, 2022). Indonesia dan Australia termasuk dalam kelompok negara dengan kekuatan menengah yang dapat menjadi jembatan bagi negara berkembang dan negara maju (Humas DPR RI 2023).

Posisi Indonesia dan Australia sebagai kekuatan menengah di kawasan Indo-Pasifik, berperan penting dalam dinamika regional. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki lokasi strategis, merupakan posisi yang strategis dalam ASEAN untuk memperjuangkan kerja sama regional dan menjaga stabilitas. Australia aktif terlibat forum multilateral seperti QUAD dan Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS). Indonesia-Australia sebagai negara berkekuatan menengah berusaha membentuk citra baik di kawasan Indo-Pasifik dengan

menyeimbangkan kepentingan dan giat mempromosikan perdamaian serta kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik (Ghalib 2023).

Kerja sama Indonesia-Australia dalam hal pertahanan dan keamanan memiliki implikasi yang lebih luas. Hal ini membuat semakin mendekatkan hubungan antara kedua negara sebagai negara berkekuatan menengah di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia meningkatkan anggaran belanja alat utama sistem senjata militernya sebagai bagian kerja sama dengan Australia. Indonesia-Australia berupaya menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik Dengan menghadapi persaingan dan ketegangan yang muncul akibat rivalitas Tiongkok dan Amerika Serikat (Ghalib 2023).

Indonesia aktif dalam membangun kerja sama dan kemitraan di bidang hak asasi manusia (HAM) dalam hubungan bilateral ataupun kerja sama multilateral di tingkat kawasan Indo-Pasifik. Diplomasi HAM Indonesia memiliki dua arah yang saling memperkuat, yaitu ikut serta dalam upaya memajukan perlindungan HAM bersama pada tingkat regional dan global di bidang HAM. Indonesia berperan memperkuat upaya nasional di bidang HAM melalui kerja sama internasional (Kementerian Luar Negeri RI 2019). Indonesia-Australia terus berupaya bersatu untuk menegakkan keadilan HAM. Kerja sama internasional dalam penegakan HAM merupakan salah satu cara memperkuat hubungan antar negara yang dapat mewujudkan sebuah perdamaian dunia.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia aktif dalam memperjuangkan demokrasi dan HAM. Hal ini dipertegas dengan pidato Joko Widodo saat pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri Australia "*Saya mengusulkan beberapa agenda prioritas menyongsong satu abad kemitraan kita,*

satu abad kemitraan kita. Kita harus terus memperjuangkan nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kemajemukan. Stop intoleransi, stop xenofobia, stop radikalisme dan stop terorisme," Joko Widodo, di Gedung Parlemen, Canberra, Australia (Natalia 2020). Hal ini juga dibuktikan dengan peran Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah yang menjaga stabilitas keamanan Indo-Pasifik dengan membuat kerja sama Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) merupakan kerja sama Indonesia-Australia dalam upaya memperkuat peradilan dan keamanan Indonesia, serta berkontribusi terhadap stabilitas Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik.

3.2.1 Culture

Culture merupakan konsepsi peran nasional para pengambil kebijakan serta keputusan dan tindakan kebijakan luar negeri mereka juga dipengaruhi atau didorong oleh dampak budaya, adat istiadat, tradisi yang dimiliki oleh suatu negara sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kerja sama internasional.

Indonesia melakukan diplomasi kultural Indonesia ke Indo-Pasifik. Indonesia menyadari mulai sulitnya melakukan diplomatik dengan tetangga pasifiknya dan sudah waktunya untuk diperbaiki. Bangsa-bangsa Pasifik tidak dapat didekatkan secara efektif dengan hanya melalui jalur politik, oleh karena itu cara diploamsi lain harus dilakukan. Bangsa Oseania memiliki keterikatan budaya yang sama, Selama beberapa dekade Indonesia mengabaikan sebagian besar negara Indo-Pasifik (Maxmanroe 2023). Pendekatan budaya merupakan pintu lebih luas dalam berinteraksi lebih jauh dengan negara-negara tetangga di sebelah timur. Dengan pendekatan budaya menjadi sarana yang efektif di Kawasan Indo-Pasifik

karena adanya timbal balik budaya sudah ada di sana. Keterlibatan Indonesia di berbagai aktivitas Pembangunan Indo-Pasifik dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan identitas yang menekankan etnis dan budaya Melanesia (Maxmanroe 2023).

Indonesia mengambil peran dalam membantu menghubungkan negara yang berada pada kepulauan Asia Tenggara dengan Oseania. Selanjutnya, identitas ganda Indonesia juga digunakan dalam penghubung antara ASEAN dan Pasifik. Dengan pemosisian ini memudahkan Indonesia untuk menjadi pemain yang kritis dalam menciptakan peningkatan hubungan antar negara. Indonesia dan negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik memiliki berbagai kepentingan yang saling melengkapi, dengan meningkatnya saling ketergantungan. Indonesia melalui diplomasi budaya berhasil mengurangi citra negatif Jakarta di antara suara-suara pro kemerdekaan yang berasal dari Kawasan Indo-Pasifik (Maxmanroe 2023).

Program kerja sama dalam bidang kebudayaan yang dilakukan Indonesia di negara-negara Indo-Pasifik juga terlihat pada adanya beasiswa seni dan budaya (BSBI). Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia mengadakan Festival Budaya Melanesia di ibu kota Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang. Festival ini bertujuan agar melestarikan budaya dan mengenalkan Melanesia kepada generasi muda serta memacu adanya interaksi budaya dari berbagai negara yang ikut terlibat (Prasetyo dan Zahidi 2022).

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia memiliki prioritas dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, yaitu memperluas keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan *Look East Policy* menekankan keterlibatan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dan adanya berbagai

inisiatif regionalisasi seperti Melanesian Spearhead Group (MSG), Forum Pengembangan Kepulauan Pasifik (PIDF) dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) (Bernadette dan Septiana 2022). Indonesia melakukan pendekatan kebudayaan sebagai langkah diplomasi dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia memaksimalkan pengaruh Selandia Baru sebagai negara besar di Kawasan Indo-Pasifik. Pengaruh Selandia Baru terhadap Indonesia dalam menjembatani adanya perbedaan pendapat antara Indonesia dengan negara Indo-Pasifik terkait isu separatisme yang dilakukan Papua. Pada tahun 2018 memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Selandia Baru, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Wellington mengadakan berbagai kegiatan seperti pameran foto, seminar publik dan panggung seni (Prasetyo dan Zahidi 2022).

Acara ini ditutup dengan adanya konser musik yang mengangkat tema “The Symphony of Friendship”. Tujuan acara ini untuk memperlihatkan kepada masyarakat setempat bahwa Indonesia juga mempunyai kemiripan budaya dengan masyarakat di Kawasan Indo-Pasifik dengan itu diharapkan tidak menjadikan Indonesia sebagai masyarakat asing (Bernadette, 2022). Selain itu Indonesia juga melakukan upaya diplomasi budaya pada Bali Democracy Forum untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia. Forum ini merupakan sebuah forum *sharing experience* untuk negara termasuk di kawasan Indo-Pasifik yang sedang mengembangkan sistem demokrasi dengan beranggotakan banyaknya negara. Pada tahun 2019 juga diselenggarakan Journalist Visit Programme (JVP). JVP merupakan program kunjungan jurnalis dari berbagai negara dengan tema bahasan yaitu terkait industri kreatif, infrastruktur, pembangunan, dan sebagainya. Adanya

program ini diharapkan para jurnalis akan dapat mempublikasikan hal-hal positif dari adanya kegiatan tersebut (Rahmadhani dan Sholeh 2021).

3.2.2 Organizations

Konsepsi dalam nasional ini berperan dalam mediator-integrator bertanggung jawab untuk memenuhi atau melakukan tugas-tugas khusus untuk mendamaikan konflik antara negara atau kelompok negara lain. *Organizations* peran nasional ini menunjukkan persepsi tentang tugas yang berkelanjutan untuk membantu musuh mengenali menghilangkan perbedaan mereka.

Indonesia bersama *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) membutuhkan dukungan kekuatan menengah kawasan, salah satunya termasuk Australia dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang dicita-citakan ASEAN. Australia adalah negara yang dapat menerima gagasan sentralitas ASEAN dalam upaya menjaga perdamaian, mendorong stabilitas, kemakmuran, dan inklusivitas di kawasan Indo-Pasifik. Pada tahun belakangan, tatanan kawasan Indo-Pasifik telah menjadi isu penting pada setiap pertemuan antara pemimpin negara dan pejabat negara. Indonesia berperan menjaga hubungan dengan Australia agar dapat mencapai konvergensi terkait keberlanjutan konsep Indo-Pasifik, Terlebih setelah perjanjian pertahanan pada 15 September 2021 yang dilakukan oleh Australia, AS dan Inggris (Roza 2021).

Peran ASEAN dalam kawasan Indo-Pasifik adalah untuk menjaga perdamaian, keamanan, kemakmuran dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Respon ASEAN dalam kawasan Indo-Pasifik adalah turut menjaga perdamaian kawasan Indo-Pasifik melalui disahkannya ASEAN *Outlook on* Indo-Pasifik (AOIP) atau berupa pandangan ASEAN tentang kawasan Indo-Pasifik sebagai

penegasan posisi ASEAN dalam perannya. AOIP lahir pada KTT ke-34 ASEAN pada tahun 2019 dengan latar belakang munculnya berbagai dinamika dan ketegangan geopolitik yang ditimbulkan oleh berbagai negara berkepentingan di kawasan Indo-Pasifik. ASEAN hadir sebagai organisasi regional terbesar di Asia Tenggara yang memiliki peran strategis dalam menghadapi dinamika tersebut (Purwanti 2023).

Melihat dinamika yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik, ASEAN memberi respon akan merangkul negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik dengan melalui prinsip utama dari AOIP yakni penguatan sentralitas ASEAN, inklusivitas, keterbukaan, dan non-intervensi. Prinsip-prinsip ini menjadi pegangan bagi ASEAN dalam merespon berbagai tantangan, sekaligus memberitahu bahwa ASEAN tidak berpihak kepada negara besar manapun demi menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik (Komariah 2023).

Outlook ini mengutamakan pendekatan dialog dan kerja sama terbuka dan inklusif dalam aspek yang menjadi prioritas ASEAN. Bidang yang menjadi prioritas ASEAN adalah maritim, konektivitas, ekonomi, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TBP)/ *Sustainable Development Goals* (SDFs). AOIP digunakan sebagai panduan atas keterlibatan ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dipertegas dengan AOIP menyebut kata “keamanan” yang berfokus pada maritim. Sementara itu, kata “pertahanan” yang bermakna pada penguatan peran ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM). ADMM itu sendiri merupakan pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN yang membahas terkait penguatan kerja sama pertahanan di kawasan Indo-Pasifik (Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar 2023).

AOIP telah menjadi acuan dokumen ASEAN dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai aktor utama dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik dari konflik kekuatan-kekuatan negara besar dunia yang semakin hari semakin menunjukkan eksistensi dalam persaingan kepentingan di kawasan Indo-Pasifik (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2023). Peran ASEAN sebagai organisasi regional terbesar adalah berusaha menjaga peran sentralnya dalam mengelola permasalahan kawasan Indo-Pasifik. Dengan adanya dokumen ini menunjukkan wujud nyata dari upaya ASEAN dalam mewujudkannya (Vincensius Dion). Peran Indonesia dalam pendirian ASEAN menunjukkan kontribusi luar biasa Indonesia dalam pembentukan organisasi ini. Pada saat pembentukan ASEAN, Indonesia diwakilkan oleh Adam Malik, Indonesia memiliki peran utama dalam ASEAN dengan sebagai mediator dan juga pendukung integrasi regional.

Indonesia juga berperan aktif dalam memfasilitasi dialog dan penyelesaian konflik diantara anggota ASEAN, mempromosikan hubungan harmonis di kawasan Indo-Pasifik, dan mendukung solusi damai (Pangemanan 2023). Indonesia tetap menjalankan peran dalam forum-forum internasional namun, tidak meninggalkan kepentingan nasionalnya. Dengan adanya ASEAN sebagai *zone of peace, freedom and neutrality* (ZOPFAN) dapat meminimalisir intervensi dari kekuatan asing sehingga kepentingan nasional Indonesia juga tidak terganggu (Widiatmaja dan Albab 2019).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hubungan bilateral Indonesia-Australia sudah terjalin cukup lama sejak awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Hubungan kerja sama keduanya terbentuk disebabkan oleh dorongan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti adanya rasa khawatir akan keberlangsungan hidup kedepan baik disebabkan oleh adanya kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal seperti adanya ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan, membantu menjaga stabilitas negara serta mewujudkan kepentingan nasional dari masing-masing negara.

Indonesia memilih rekan kerja sama dengan Australia, mengingat kedua negara yang berdekatan secara letak geografis serta memiliki keinginan yang sama dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil dan makmur. Menjadi pondasi penting kesamaan pandangan kedua negara dalam menghadapi persoalan. Alasan Australia memilih Indonesia sebagai negara kerja samanya telah tercantum dalam *Foreign Policy White Paper 2017*. Bahwasannya posisi Indonesia yang strategis di kawasan Indo-Pasifik menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Letak Indonesia yang menguntungkan berada pada jalur persimpangan dua Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Sebagian wilayah perairan Indonesia yang luas menjadi jalur perlintasan maritim dunia, Hal ini membuat Indonesia tidak dapat mengabaikan terkait permasalahan keamanan perairan maritim terutama di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam konteks histori hubungan Indonesia-Australia tidak selalu berjalan mulus karena terdapat perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi dan juga budaya politik antar keduanya. Meskipun terdapat beberapa dinamika hubungan bilateral yang dialami, Indonesia-Australia tetap berusaha untuk meningkatkan hubungan bilateral antar keduanya agar terus tumbuh kuat. Adapun kerja sama yang dilakukan Indonesia-Australia dalam upaya menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik seperti, kerja sama di bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan terutama dalam keamanan laut maritim. Indonesia-Australia merupakan negara berkekuatan menengah yang menjaga stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Indonesia-Australia berada di lingkungan yang menjadi perebutan pengaruh bagi negara berkekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Seiring bertambahnya waktu pertumbuhan ekonomi terus berjalan didukung dengan kekuatan militer yang semakin canggih. Dengan kekuatan yang dimiliki, Tiongkok terus memperluas pengaruhnya ke berbagai negara di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini membuat kekhawatiran bagi beberapa negara sekitar perbatasan atas terbatasnya akses dan pengaruh kuat yang dimiliki Tiongkok. Adapun peran yang dilakukan Indonesia sebagai poros maritim dunia di kawasan Indo-Pasifik dengan memperhatikan minat dan tujuan yang ingin dicapai.

Peran Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik adalah mengembangkan infrastruktur maritim, memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik dan meningkatkan keamanan maritim. Keinginan Indonesia untuk dapat memperkuat klaimnya sebagai kekuatan maritim dunia diwujudkan dengan menjalankan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Prinsip dan nilai yang dimiliki Indonesia mengutamakan sikap netral dan memuliakan kesetaraan hak

individu terhadap negara berkonflik. Langkah Indonesia memiliki tujuan agar dapat mencapai kepentingan nasional dengan tidak memihak blok manapun. Indonesia menerapkan strategi *indirect balancing* melalui kerja sama pertahanan dengan Australia sebagai aktor eksternal. Namun, Indonesia juga tetap menjalin kerja sama dengan Tiongkok.

Potensi ancaman yang ditimbulkan oleh AUKUS membuat pemerintah Indonesia harus mengantisipasinya, yaitu dengan diplomasi budaya. Diplomasi budaya merupakan strategi yang dilakukan Indonesia dalam mengembangkan *soft power* sebagai alternatif atas kekurangan pada *hard power*. Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah yang menjaga stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik bersama ASEAN membutuhkan dukungan kekuatan menengah kawasan, termasuk Australia dalam upaya mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang dicita-citakan ASEAN. Indonesia berperan memfasilitasi dialog, penyelesaian konflik diantara negara anggota dan mempromosikan pentingnya perdamaian di kawasan Indo-Pasifik.

2.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang sudah diteliti dalam jangka waktu 2014-2023 terkait Analisis Peran Kerjasama Indonesia-Australia di kawasan Indo-Pasifik masa pemerintahan Joko Widodo dalam misi menjaga stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik terkait dengan penulisan. Penulis juga merekomendasi peneliti selanjutnya pembahasan dapat dilakukan secara meluas tidak hanya dalam sudut pandang Indonesia, melainkan juga Australia. Pembahas dapat menjelaskan peran kerja sama Indonesia-Australia pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2019-2024 dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi mengingat masa tersebut adalah masa dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Maka, penelitian ini penting untuk menjadi bahan bagi penelitian selanjutnya dalam melihat apa saja peran kerja sama Indonesia-Australia dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik terhadap krisis ekonomi pada masa pandemi terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abke, Tom. 2021. "Australia dan Indonesia bekerja sama untuk mempertahankan kedaulatan maritim." Indo-Pacific Defense Forum. <https://ipdefenseforum.com/id/2021/01/australia-dan-indonesia-bekerja-sama-untuk-mempertahankan-kedaulatan-maritim/>
- Adelini, Tisnaini, Endah Heliana, and Bambang I. Aryanto. 2019. "Swantara Visi Indonesia Maju." *Lembaga Ketahanan Nasional*, (Desember), 1-56. https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Swantara/Swantara_31_-_Desember_2019.pdf
- Adittiya, Ilham, and Rexzy F. Adrian. 2022. "UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (Agustus): 34-39. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/39/140>
- Agastia, I Gusti B. 2020. "Understanding Indonesia's role in the 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific': A role theory approach." *Asia & The Pacific Policy Studies*, (Agustus), 293-305. 10.1002/app5.308.
- Alfiano, Jofanka, Putri Hergianasari, and Triesanto R. Simanjuntak. 2022. "EFEKTIVITAS HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA MELALUI PROGRAM AUSAID DI SEKTOR PENDIDIKAN ERA JOKOWI PADA TAHUN." *Journal of Integrated Science and Technology* 3, no. 7 (Juli): 772-784. <https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/445/807>
- Aliffitria, Bhilla. 2019. "Pengaruh Implementasi United Nation Convention Against Corruption Terhadap Pemberantas Korupsi di Australia Periode 2013-2017." *Insignia Journal of International Relation* 6 (2): 106-122. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/1546/1233>
- Amanullah, Juni. 2021. "Kerjasama Internasional Antar Bangsa." Berita - Organisasi Kemahasiswaan Universitas STEKOM. <https://ormawa.stekom.ac.id/berita/kerjasama-internasional-antar-bangsa>
- Ansari, Rahmat. 2016. "KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM PENANGANAN TERORISME DI INDONESIA TAHUN 2002 – 2013." *Journal of International Relations* 2 (1): 88-96. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1436376&val=4718&title=KERJA%20SAMA%20BILATERAL%20INDONESIA%20DAN%20AUSTRALIA%20DALAM%20PENANGANAN%20TERORISME%20DI%20INDONESIA%20TAHUN%202002%20%202013>
- Antara Berita Indonesia. 2022. "Menlu Retno paparkan strategi Indonesia untuk merangkul Pasifik." ANTARA Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaraneews.com/berita/3104993/menlu-retno-paparkan-strategi-indonesia-untuk-merangkul-pasifik>
- Antara.News.Com. 2006. "Kejagung Umumkan Data Koruptor Buron Eks Bank BHS." ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/45213/kejagung-umumkan-data-koruptor-buron-eks-bank-bhs>

- Aufiya, Mohd A. 2017. "Indonesia's Global Maritime Fulcrum: Contribution in the Indo-Pacific Region." *Andalas Journal of International Studies* 6 (2): 143-159. doi.org/10.25077/ajis.6.2.143-158.2017.
- Australia Government. 2010. "Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan." *Departement of Foreign Affairs and Trade*, (July), 1-117.
- Australian Government. 2017. "Chapter three: A stable and prosperous Indo-Pacific." *Foreign Policy White Paper 2017*. <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/minisite/static/4ca0813c-585e-4fe1-86eb-de665e65001a/fpwhitepaper/pdf/2017-foreign-policy-white-paper.pdf>
- BBC News Indonesia. 2017. "Pasang surut hubungan Australia dan Indonesia: tegang namun pragmatis." BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527300>
- Bernadette, Sophia, and Rizka Septiana. 2022. "Music Matters: Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Negara di Kawasan Pasifik Melalui 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru." *Indonesia Perspective* 7, no. 2 (Juli-Desember): 205-227. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/50779>
- Brown, Colonel P. 2012. "Australian Influence in the South Pacific." *Australian Defence Force Journal*, no. 189 (Januari), 66-78. <https://search.informit.org/doi/epdf/10.3316/informit.464417992245242>
- COLBRAN, Nicola. 2015. "Sense and Simplicity in Legal and Human Rights Co-Operation: A Case Study of Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 2:195-206. <https://sci-hub.hkvisa.net/10.1017/als.2015.3>
- "DIPLOMASI INDONESIA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2015-2019." 2022. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* 9, no. 1 (Juni): 1-15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/32577>
- El -Haq, Muhammad N., and Muhammad S. El-Islam. 2020. "AUSTRALIA SEBAGAI KEKUATAN REGIONAL DALAM EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DI KAWASAN PASIFIK." *Indonesian Journal of International Relations* 4, no. 1 (Mei): 49-68. <https://journal.aihii.or.id/index.php/ijir/article/view/117/53>
- Fatimah, Amelia, Rudy Sutanto, and Agus Adrianto. 2023. "Diplomasi Budaya Melanesia sebagai Strategi Pemanfaatan Kekuatan Laut Nasional dalam Menghadapi Pakta Pertahanan Australia, United Kingdom, dan United States (AUKUS)." *Humanika* 30, no. 1 (Juli): 80-90. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/52078>.
- "Foreign Policy Makers and Their National Role Conceptions." 1980. *Wiley on behalf of The International Studies Association* 24, no. 4 (December): 532-554.
- G20 Pedia. 2022. "Informasi Presidensi G20 Indonesia 2022." *G20 Indonesia 2022*, (Januari), 1-236. <https://indonesia.go.id/g20//g20/kategori/g20/4177/g20pedia?lang=1?lang=1>
- Ghalib, Shaliq K. 2023. "IMPLEMENTATION OF COOPERATION RELATIONS BETWEEN INDONESIA AND AUSTRALIA IN THE

- SOUTH CHINA SEA SECURITY CONFLICT 2019–2023.” *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* 10, no. 2 (Desember). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/34870>.
- Ginting, Vincensius D., and Khairunnisa Simbolon. 2023. “ASEAN Outlook on Indo-Pacific sebagai Respon akan Kehadiran The Quadrilateral Security Dialogue di Kawasan Indo-Pasifik.” *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia* 5, no. 1 (April): 45-54. <https://jhii.fisip.unila.ac.id/ojs/index.php/jhii/article/view/18>
- Haryanto, Agus. 2014. “PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN.” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Program Studi Hubungan Internasional* 4, no. 2 (Desember): 17-27. 10.34010/JIPSI.V4I02.165.
- Holsti, K. J. 1970. “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy.” *Wiley on behalf of The International Studies Association* 14, no. 3 (September): 233-309.
- HukumOnline.Com. 2013. “Australia Ekstradisi Adrian Kiki.” *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/australia-ekstradisi-adrian-kiki-lt52b19ba2e52a2/>
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2018. “Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.” Sekretariat Kabinet RI. <https://setkab.go.id/esensi-hubungan-internasional-dan-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia/>
- Humas DPR RI. 2023. “DPR RI Jadi Tuan Rumah Pertemuan MIKTA ke-9.” *Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47520/t/DPR%20RI%20Jadi%20Tuan%20Rumah%20Pertemuan%20MIKTA%20ke-9>
- Humas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2009. “Indonesia dan Australia Bangun Rasa Saling Percaya Antar Kedua Negara.” Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2016/03/21/indonesia-dan-australia-bangun-rasa-saling-percaya-antar-kedua-negara.html>
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2023. “Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Melalui ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan dan Tantangan.” Sekretariat Kabinet RI. <https://setkab.go.id/implementasi-asean-outlook-on-the-indo-pacific-melalui-asean-indo-pacific-forum-2023-kemanfaatan-dan-tantangan/>
- Humas Unpar. 2023. “Melihat Posisi Indonesia dan Kanada Sebagai Negara Middle Power.” Universitas Katolik Parahyangan. <https://unpar.ac.id/melihat-posisi-indonesia-dan-kanada-sebagai-negara-middle-power/>
- Hutomo, Bagus W., Marsetio, Rudiyanto, Pujo Widodo, Herlina Juni Saragih, and Panji Suwarno. 2023. “Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (Juni): 143-153. doi.org/10.31316/jk.v7i1.4712
- Ikbar, Yanuar, and Dandan Wildani. 2014. *Metodologi dan teori hubungan internasional*. 1st ed. Bandung: Bandung Refika Aditama.
- Indonesia Corruption Watch. 2009. “Adelin Lis Dikabarkan di Australia.” Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/adelin-lis-dikabarkan-di-australia>

- Istanto, Yusuf. 2015. "PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU ILLEGAL FISHING SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG)." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN & CALL FOR PAPERS UNISBANK*. <https://media.neliti.com/media/publications/173257-ID-peneggelaman-kapal-pelaku-illegal-fishi.pdf>
- Jaknanihan, Arrizal A., and Alfin F. Basundoro. 2023. "Otonomi atau Limitasi? Batasan Praktik Politik Bebas-Aktif dalam Mewujudkan Strategi Indo-Pasifik Indonesia." *Political and security issues*, (Januari), 5-25. https://www.researchgate.net/profile/Alfin-Febrian-Basundoro/publication/367523936_Otonomi_atau_Limitasi_Batasan_Praktik_Politik_Bebas-Aktif_dalam_Mewujudkan_Strategi_Indo-Pasifik_Indonesia/links/63d66fc3c97bd76a8246cc99/Otonomi-atau-Limitasi-Batasan-Praktik
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kazakhstan. 2018. "Kedutaan Besar Republik Indonesia , di ASTANA, , KAZAKHSTAN." <https://www.kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar. 2023. "Esensi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)." Kemlu. <https://kemlu.go.id/yangon/id/news/24713/esensi-asean-outlook-on-the-indo-pacific-aoip>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2023. "Kedepankan Prinsip Saling Menguntungkan, Indonesia Terus Berperan Aktif dalam Berbagai Forum Kerja Sama Ekonomi Internasional." Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5524/kedepankan-prinsip-saling-menguntungkan-indonesia-terus-berperan-aktif-dalam-berbagai-forum-kerja-sama-ekonomi-internasional>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2023. "Kerja Sama Bilateral | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." Kemlu. https://kemlu.go.id/portal/id/page/22/kerja_sama_bilateral
- Kementerian Luar Negeri RI. 2019. "Indonesia Dan Hak Asasi Manusia | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." Kemlu. https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia
- Kementerian Luar Negeri RI. 2023. "Indian Ocean Rim Association | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." Kemlu. https://kemlu.go.id/portal/id/read/167/halaman_list_lainnya/indian-ocean-rim-association
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. "Kementerian Pertahanan Republik Indonesia." Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2015/10/08/menhan-ri-tegaskan-pentingnya-kerjasama-internasional-untuk-ciptakan-perdamaian-dan-stabilitas-2.html>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2021. "Kementerian Pertahanan Republik Indonesia." Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2021/09/09/menhan-ri-indonesia-dan-australia->

- [sepakat-meningkatkan-dca-menjadi-kerjasama-pertahanan-komprehensif.html](#)
- Kitaoka, Shinichi. 2019. "Vision for a Free and Open Indo-Pacific." *Taylor & Francis Online* 26, no. 1 (September). <https://doi.org/10.1080/13439006.2019.1618592>
- Komariah, Fitratun. 2023. "ASEAN Turut Jaga Kedamaian Kawasan Indo-Pasifik Melalui AOIP." Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/bali/ktt-asean/345786/asean-turut-jaga-kedamaian-kawasan-indo-pasifik-melalui-aoip>
- Kominfo. 2023. "ASEAN Pererat Kerja Sama dengan IORA dan PIF." Kementerian Komunikasi dan Informatika. https://www.kominfo.go.id/content/detail/51343/asean-pererat-kerja-sama-dengan-iora-dan-pif/0/rilis_media_gpr
- Kominfo Indonesia Terkoneksi. 2016. "Menuju Poros Maritim Dunia." Kementerian Komunikasi dan Informatika. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata
- KSM Defensia. 2022. "Peningkatan Defense Cooperation Agreements Indonesia-Australia." Wix.com. <https://ksmdefensiaupnvy.wixsite.com/home/post/peningkatan-defense-cooperation-agreements-indonesia-australia>
- Laksmi, Ni Made R. 2017. "Implementasi Aviation Safety Improvement oleh Pemerintah Indonesia-Australia melalui Kerjasama Air Transport Sector." *Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana* 1, no. 1 (1): 1-14.
- Larasasati, Cindy, and Ester D. Natasya. 2018. "Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Hubungan Internasional* 10, no. 2 (Januari): 147-159. <https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7302>
- Limbong, Bernhard. 2015. *Poros maritim*. N.p.: Penerbit Margaretha Pustaka.
- Liputan6.com. 2002. "Hendra Rahardja Divonis Hukuman Penjara Seumur Hidup - News Liputan6.com." Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/31170/hendra-rahardja-divonis-hukuman-penjara-seumur-hidup>
- Liputan6.com. 2003. "Hendra Rahardja Meninggal di Australia - News Liputan6.com." Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/48600/hendra-rahardja-meninggal-di-australia>
- Maxmanroe. 2023. "Dari Jakarta ke Oseania: Diplomasi Kultural Indonesia ke Pasifik." Universitas Airlangga. <https://unair.ac.id/dari-jakarta-ke-oseania-diplomasi-kultural-indonesia-ke-pasifik/>
- Medcalf, Rory. 2014. "In defence of the Indo-Pacific: Australia's new strategic map." *Taylor & Francis Online* 68, no. 4 (May). <https://doi.org/10.1080/10357718.2014.911814>
- Murdiyana, and Mulyana. 2017. "ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA." *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN* 10, no. 1 (Agustus): 74-96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>

- Natalia, Desca. 2020. "Jokowi ajak Australia ikut perjuangkan demokrasi dan HAM." Antaranews.com.
<https://www.antaranews.com/berita/1287194/jokowi-ajak-australia-ikut-perjuangkan-demokrasi-dan-ham>
- Ningsih, Widya L. 2022. "Black Armada, Aksi Boikot Australia terhadap Belanda demi Indonesia Halaman all." Kompas.com.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/03/160000379/black-armada-aksi-boikot-australia-terhadap-belanda-demi-indonesia?page=all>
- Nuranisa, Salma A. 2022. "Peran Strategis Kerjasama IA-CEPA Terhadap Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* 6, no. 2 (Juli): 192-202.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/47310/23431>
- Prabowo, Dani. 2014. "Adrian Kiki Ariawan, Buron Terpidana Kasus BLBI Telah Diekstradisi." KOMPAS.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/0222250/Adrian.Kiki.Ariawan.Buron.Terpidana.Kasus.BLBI.Telah.Diekstradisi>
- Purnama, Basuki E., and Joan I. Pangemanan. 2023. "Ini Peran Indonesia dalam Lingkup ASEAN." Media Indonesia.
<https://mediaindonesia.com/internasional/630666/ini-peranindonesia-dalam-lingkup-asean>
- Purwanti, Teti. 2023. "Indonesia Kukuhkan Peran ASEAN untuk Kemakmuran Asia-Pasifik." CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230904132656-4-468914/indonesia-kukuhkan-peran-asean-untuk-kemakmuran-asia-pasifik>
- Rahmadhani, Rizki, and Badrus Sholeh. 2021. "Improving Justice and Security in Indonesia: The Role of Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)." *Global Focus* 1 (1): 103-116.
<https://globalfocus.ub.ac.id/index.php/globalfocus/article/view/49/13>
- Ramadhany, Nadya P. 2020. "KERJA SAMA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM BIDANG KEAMANAN MARITIM PADA TAHUN 2017 -2019." *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* 7, no. 2 (Juli-Desember): 1-12.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/29107/28047>
- Rifaldy, Yusuf. 2020. "Melihat Latar Belakang Australia dalam Memberikan Bantuan Luar Negeri ke Kawasan Pasifik." *Journal Hubungan Internasional* 13, no. 2 (Juli): 185-200.
https://www.researchgate.net/publication/347393259_Melihat_Latar_Belakang_Australia_Dalam_Memberikan_Bantuan_Luar_Negeri_ke_Kawasan_Pasifik
- Rizandi, Muhammad A., Anita A. Sinulingga, and Inda M. Permata. 2022. "HAMBATAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) TAHUN 2015-2020." *Politics, Humanities, Laws, International Relations and Sociaal (PALITO)* 01 (01).
<http://palito.fisip.unand.ac.id/index.php/palito/article/view/42/8>

- Roza, Rizki. 2021. "PENGUATAN HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DI INDO-PASIFIK." *Bidang Hubungan Internasional Info Singkat* 13, no. 18 (September): 7-12. <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1230>
- Rundjan, Rahadian. 2021. "Apa Hubungan antara Makassar-Aborigin? – DW – 13.11.2021." DW.Com. <https://www.dw.com/id/merefleksikan-sejarah-koneksi-makassar-aborigin/a-59448444>
- Saeed, Muhammad. 2017. "From the Asia-Pacific to the Indo-Pacific." *World Scientific Publishing Company* 3 (4): 499 - 512. <https://doi.org/10.1142/S2377740017500324>
- Scott, David. 2019. "Taiwan's Pivot to the Indo-Pacific." *Taylor & Francis Online* 26, no. 1 (September). <https://doi.org/10.1080/13439006.2019.1618602>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2018. "Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia." Sekretariat Kabinet RI. <https://setkab.go.id/esensi-hubungan-internasional-dan-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia/>
- Setiawan, Joko. 2019. "Creating Shared Value Mengembangkan Kolaborasi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat*." Pekerja Sosial dan PROPER. <https://peksosdanproper.home.blog/2019/04/21/creating-shared-value-mengembangkan-kolaborasi-pemerintah-dunia-usaha-dan-masyarakat/>
- Setyawati, Siti M., and Dafri Agussalim. 2015. "Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 19, no. 2 (November): 111-124. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10848/pdf>
- Share Value Indonesia. 2022. "Creating Shared Value Sebagai Strategi Bisnis." Shared Value Indonesia. <https://www.sharedvalueindonesia.com/creating-shared-value-sebagai-strategi-bisnis/>
- Sobarini, Erynn. 2021. "Peluang Potensial dan Dampak Visi Poros Maritim bagi Hubungan Indonesia-Australia." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 7, no. 2 (Juli): 95-112. <https://doi.org/10.33172/jdp.v7i2.730>
- Sudjatmiko, Totok, and Meilinda S. Yatusman,. 2022. "PERAN INDONESIA SEBAGAI KEKUATAN MENENGAH DALAM G20 DI TENGAH DISRUPSI GEOPOLITIK KONFLIK RUSIA-UKRAINA." *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 2 (Desember): 93-110. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/1224/592>
- Swastanto, Yoedhi. 2019. "Indonesia–Australia cooperation: a key to stability in the Indo-Pacific." Australian Strategic Policy Institute. <https://www.aspistrategist.org.au/indonesia-australia-cooperation-a-key-to-stability-in-the-indo-pacific/>
- Thufail, Afif A. 2020. "Komparasi Kebijakan Australia terhadap Indonesia Masa Partai Buruh dan Liberal." *Jurnal Penelitian Department of International Relations, State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah* 5 (1): 33-45. <https://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JIIR/article/view/73/97>
- Wahyuningtyas, Ririn. 2016. "IMPLEMENTASI KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DI BIDANG PENYELUNDUPAN ORANG." *JOM FISIP* 3, no. 2 (Oktober): 1-16. <https://media.neliti.com/media/publications/118713-ID-implementasi-kerjasama-penegakan-hukum-a.pdf>

- Wibawana, Widhia A. 2023. "Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional serta Manfaatnya." detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6558335/peran-indonesia-dalam-hubungan-internasional-serta-manfaatnya>
- Widiatmaja, Aji, and Ulul Albab. 2019. "Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regiona." *Politica* 10, no. 1 (Mei): 77-93. 10.22212/jp.v10i1.1313.
- Wijayanti, Yeni. 2019. "Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995." *Jurnal Artefak* 3 (1): 51-58. <https://media.neliti.com/media/publications/118713-ID-implementasi-kerjasama-penegakan-hukum-a.pdf>
- Wulandari, Alvira R., and Dadan Suryadipura. 2021. "Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019)." *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* 33, no. 2 (Agustus): 103-125. <https://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/33521/15861>
- Yanuarti, Indri, Makarim Wibisono, and I Wayan Midhio. 2020. "STRATEGI KERJA SAMA INDO-PASIFIK UNTUK Mendukung PERTAHANAN NEGARA: PERSPEKTIF INDONESIA." *Jurnal Strategi Pertahanan Semesta* 6, no. 1 (May). <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/538>